



# **REVISI RENSTRA 2014 - 2019**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**



**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

**GUBERNUR RIAU**

# KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019. Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran instansi.

Manajemen organisasi yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok merumuskan kebijakan dan koordinasi di Bidang Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau.

Untuk menyatukan persepsi dan arah kebijakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudahan dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam waktu 5 (lima) tahun pada 2014-2019 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berbagai kebijakan program dan kegiatan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi menjadi birokrasi bersih, kompeten dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang diserahkan tugas untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara secara konsisten terus menegakan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap peran dan tugas.

Untuk mewujudkan azas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mewujudkan pemerintahan yang *good governance* sangat diperlukan pedoman dan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah ini menjadi *blueprint* pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan serta acuan dalam : 1) penyusunan rencana kinerja *{performance plan}*; 2) penyusunan rencana kerja anggaran *{workplan and budget}*; menyusun penetapan kinerja *{performance agreement}*; 4) pelaksanaan tugas,

pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau; dan 5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Pekanbaru, Februari 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU



**IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19650904 199703 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
I.1 Latar Belakang .....	I-1
I.2 Landasan Hukum .....	I-3
I.3 Maksud dan Tujuan.....	I-7
I.4 Sistematika Penulisan .....	I-7
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
II.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	II-1
II.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah	
Provinsi Riau .....	II-4
II.2.1 Sumber Daya Manusia.....	II-4
II.2.2 Sarana Prasarana .....	II-9
II.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah	
Provinsi Riau .....	II-10
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.....	II-51
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas	
Dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah	
Provinsi Riau .....	III-1
III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program	
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ....	III-4

	III.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-6
	III.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-9
	III.5. Penentuan Isu-isu strategis .....	III-10
<b>BAB</b>	<b>IV : TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
	IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	IV-1
<b>BAB</b>	<b>V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB</b>	<b>VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB</b>	<b>VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB</b>	<b>VII. PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

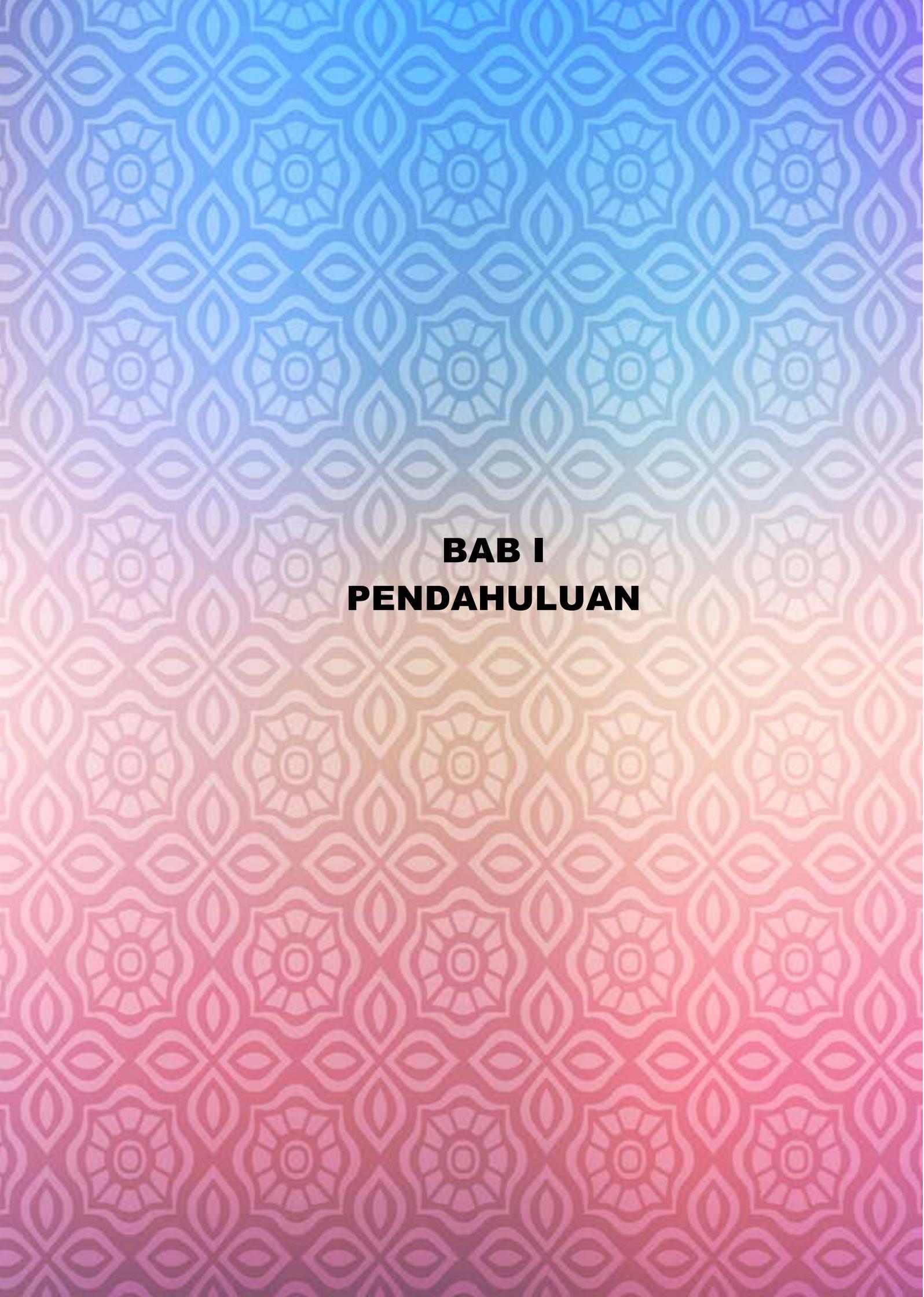
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2017.....	II-4
Tabel 2.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Menurut Golongan Ruang Gaji Tahun 2017 .....	II-5
Tabel 2.3.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Menurut Pendidikan Formal Tahun 2017 .....	II-6
Tabel 2.4.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Menurut Pendidikan Penjurusan Tahun 2017 .....	II-7
Tabel 2.5.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 .....	II-8
Tabel 2.6.	Keadaan Prasarana dan sarana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 .....	II-10
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pelayanan BKD Provinsi Riau 2009-2013 .....	II-12
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pelayanan BKD Provinsi Riau 2014-2016 .....	II-12
Tabel 2.9.	Realisasi Capaian Belanja BKD Provinsi Riau Berdasarkan RENSTRA Tahun 2009-2013 BKD .....	II-13

Tabel 2.10.	Realisasi Capaian Belanja BKD Provinsi Riau Berdasarkan RENSTRA Tahun 2014-2016 BKD .....	II-25
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-1
Tabel 3.2.	Kekuatan dan Kelemahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.....	III-2
Tabel 3.3.	Tantangan dan Peluang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.....	III-3
Tabel 3.4.	Analisis Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau.....	III-10
Tabel 3.5.	Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-13
Tabel 3.6.	Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah P Provinsi Riau.....	III-14
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Provinsi Riau.....	IV-2
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	V-6
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2016 .....	VI-10
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	VII-2

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi .....	II-3
Gambar 2.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2017.....	II-5
Gambar 2.3. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Menurut Golongan Ruang Gaji.....	II-6
Gambar 2.4. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Menurut Pendidikan Formal Tahun 2017 .....	II-7
Gambar 2.5. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Menurut Pendidikan Penjurusan Tahun 2017 .....	II-8
Gambar 2.6. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017.....	II-9



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra juga merupakan sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka memiliki keunggulan yang kompetitif, maka para pimpinan dan bawahan haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses rencana strategis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) pada hakekatnya merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan langkah-langkah tahap pembangunan Perangkat Daerah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Renstra -PD merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan. Renstra-PD, memiliki arti dan peranan strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan panjang pemerintah daerah baik secara langsung atau tidak langsung.

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Strategis yang akan dipedomani dalam penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Renja-PD)

untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara tertulis mengamanatkan kepada setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk dapat menyusun Rencana Strategis.

Renstra-PD, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi penunjang kepegawaian dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai acuan makro dalam pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara antara lain menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara didasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjelasan diatas memberikan gambaran dan arahan bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi

birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Untuk itu Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2014-2019, sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, mengelaborasi pola dan prinsip pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan capaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau. Dengan kata lain program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis tentunya berupaya mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dengan mempedomani norma dan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta peraturan kepegawaian secara nasional.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa regulasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran

- Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2000-2020 sebagaimana telah diubah dengan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai gambaran umum atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada 5 (lima) tahun ke depan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan professional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan dari Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 untuk menjadi tolak-ukur penyusunan program, kegiatan dan anggaran sehingga menghasilkan output yang jelas dalam pelaksanaan tugas Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam bentuk program-program kegiatan pembangunan yang relevan dengan situasi, kondisi, permasalahan dan potensi yang ada mulai tahun 2014 sampai dengan 2019.

Penyesuaian terhadap sistematika Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana strategis, serta susunan garis besar isi dokumen;

#### **BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau ini.

### **BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019.

### **BAB VIII PENUTUP**

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.



**BAB II**  
**GAMBAR PELAYANAN BKD**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU**

##### **2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah

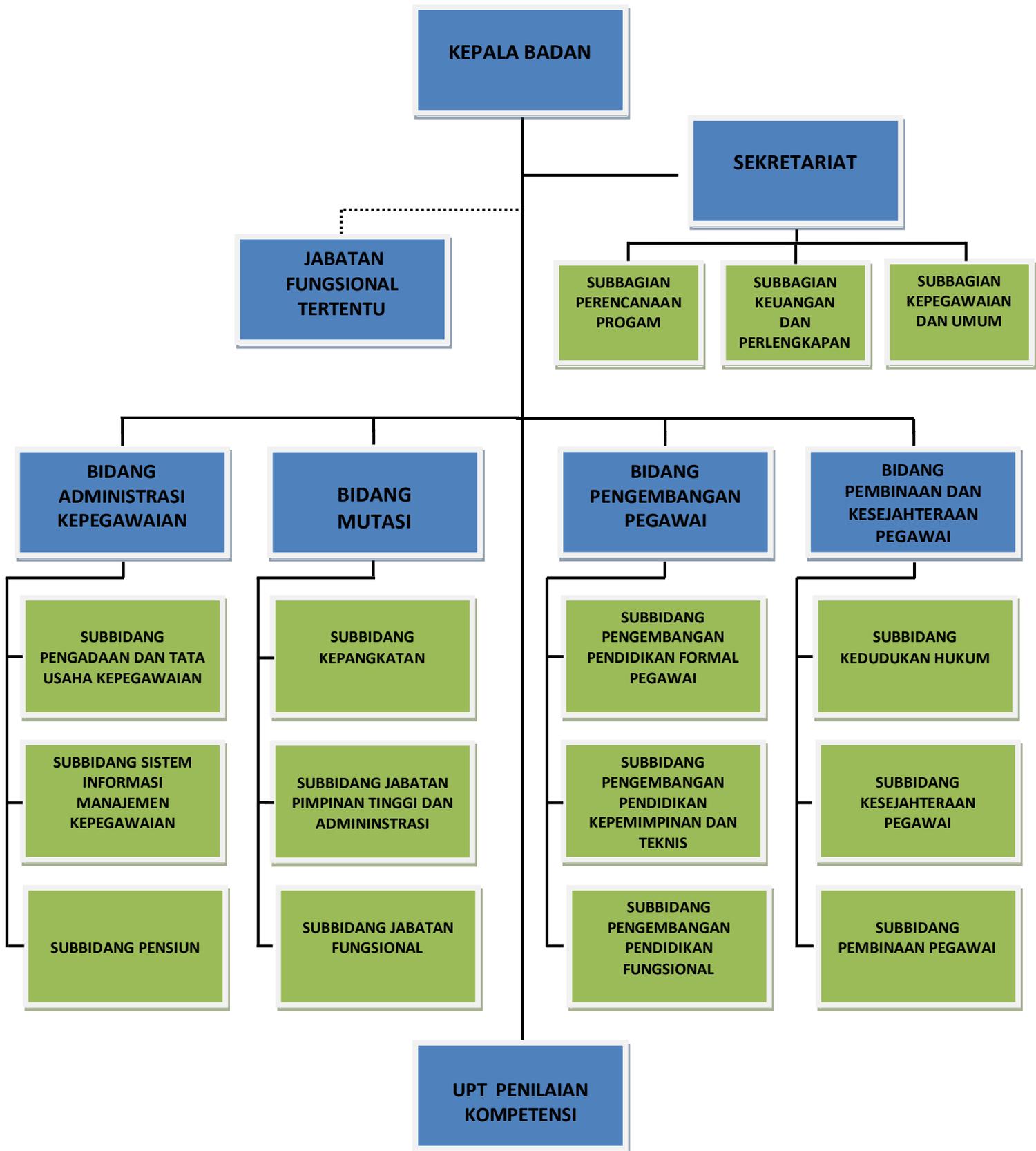
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Perencanaan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelola Barang Milik Daerah; dan
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Pengadaan, dan Tata Usaha Kepegawaian;
  - 2. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; dan
  - 3. Subbidang Pensiun.
- d. Bidang Mutasi, terdiri dari:
  - 1. Subbidang Kepangkatan;
  - 2. Subbidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi; dan
  - 3. Subbidang Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
  - 1. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;
  - 2. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Teknis; dan
  - 3. Subbidang Pengembangan Pendidikan Fungsional.
- f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari:
  - 1. Subbidang Kedudukan Hukum;
  - 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.; dan
  - 3. Subbidang Pembinaan Pegawai.
- g. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2. Seksi Penyelenggaraan Kompetensi;
  - 3. Seksi Pengembangan Kompetensi;
- h. Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi BKD Provinsi Riau**



## 2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang disingkat SDM merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. SDM dalam sebuah organisasi adalah penggerak organisasi tersebut. Demikian pula dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, profesional dan handal. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau didukung dengan 137 orang pegawai negeri sipil, dengan perincinan sebagai berikut:

#### a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Eselon

Tabel 2.1.

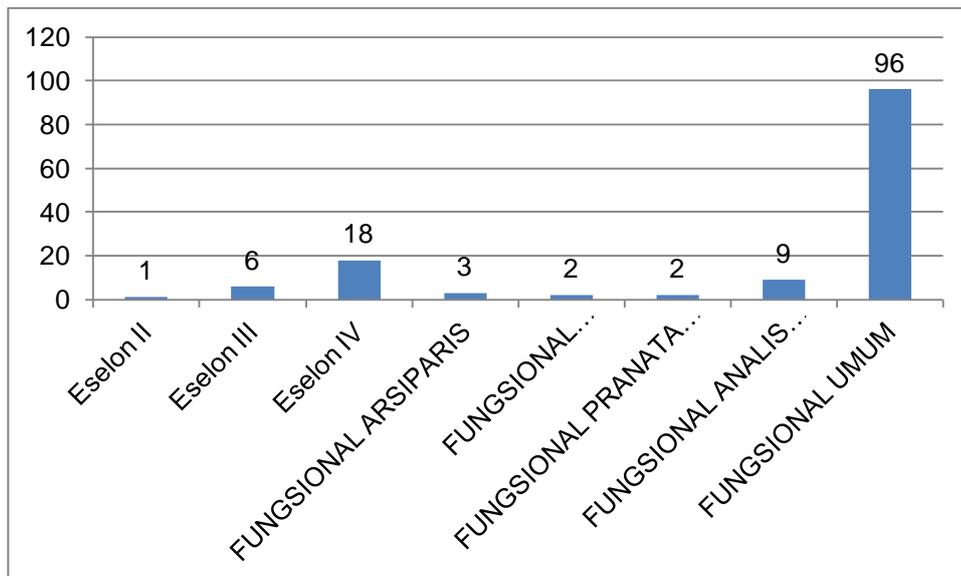
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2017

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH	%
1.	Eselon II	1	0,73
2.	Eselon III	6	4,38
3.	Eselon IV	18	13,14
4.	Fungsional Arsiparis	3	2,19
5.	Fungsional Perencana	2	1,46
6.	Fungsional Pranata Komputer	2	1,46
7.	Fungsional Analisis Kepegawaian	9	6,57
6.	Fungsional Umum	96	70,07
<b>JUMLAH</b>		<b>137</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Daerah Provinsi Riau  
Tahun 2017

Secara sederhana gambaran Pegawai Negeri Sipil Badan Daerah Provinsi Riau Menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini:

Gambar 2.2.  
Keadaan PNS BKD Provinsi Riau Menurut Jabatan  
Tahun 2017



b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji

Tabel 2.2.  
Keadaan PNS BKD Provinsi Riau Menurut Golongan Ruang Gaji  
Tahun 2017

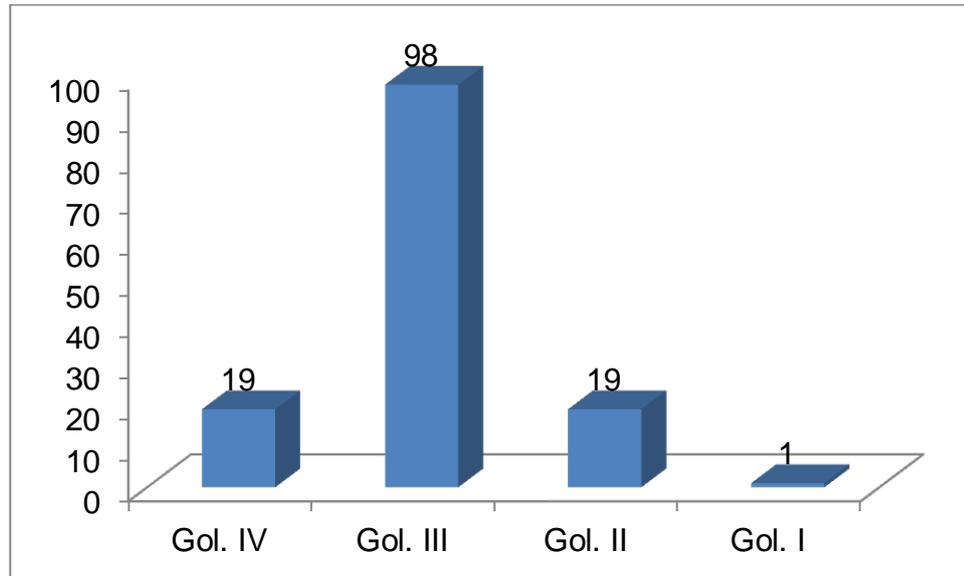
NO	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	%
1.	Gol. IV	19	13,87
2.	Gol. III	98	71,53
3.	Gol. II	19	13,87
4.	Gol. I	1	0,73
<b>JUMLAH</b>		<b>137</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Riau Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel 2.2 diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 98 orang atau 71,53%, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan I yang berjumlah 1 orang atau 0,73%. Secara sederhana kondisi pegawai negeri sipil menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini:

Gambar 2.3.

Keadaan PNS BKD Provinsi Riau Menurut Golongan Ruang Gaji



c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Tabel 2.3.

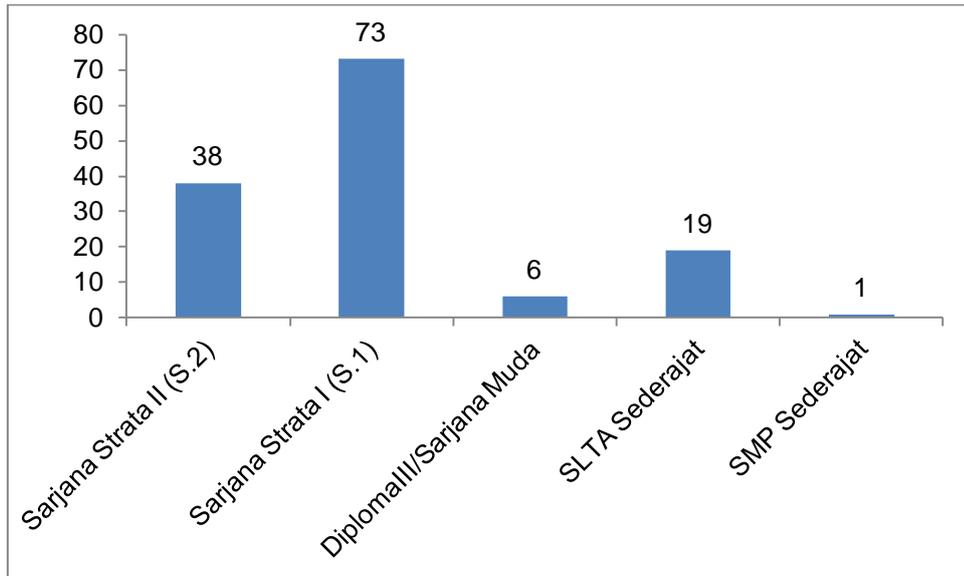
Tingkat Pendidikan Formal PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017

O.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Sarjana Strata II (S.2)	38	27,74
2.	Sarjana Strata I (S.1)	73	53,28
3.	Diploma III/Sarjana Muda	6	4,38
4.	SLTA Sederajat	19	13,87
5.	SMP Sederajat	1	0,73
JUMLAH		137	100

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

Dari data pada tabel 2.3. diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 73 orang atau 53,28%. Secara umum tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau cukup baik, dimana dari 137 orang pegawai negeri sipil terdapat 38 orang atau 27,74% yang berpendidikan Sarjana Strata II. Secara sederhana dapat lihat gambar berikut ini:

Gambar 2.4.  
Tingkat Pendidikan Formal PNS BKD Provinsi Riau



d. Kedaaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan.

Tabel 2.4.  
Tingkat Pendidikan Penjenjangan PNS BKD Provinsi Riau  
Tahun 2017

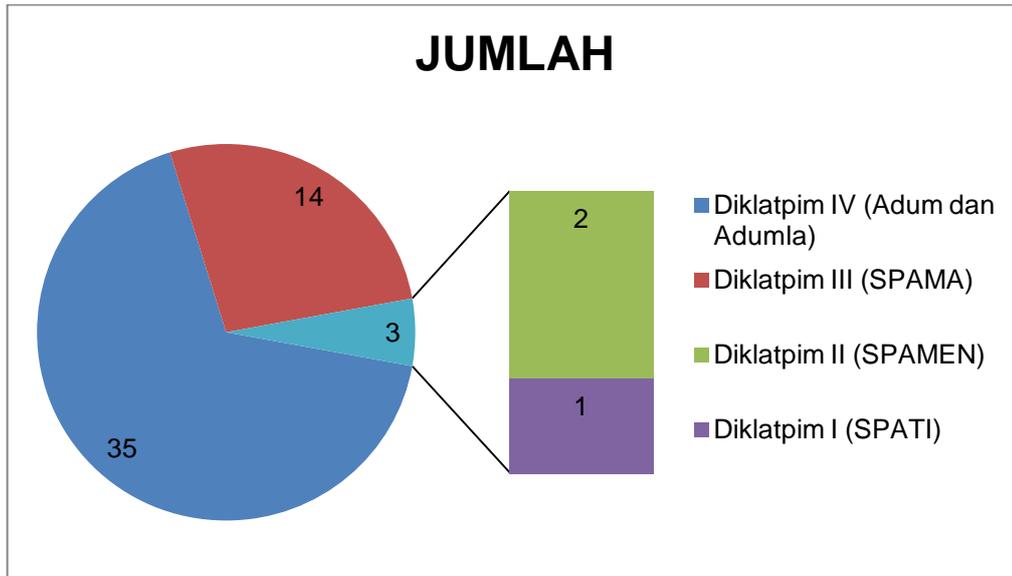
NO	TINGKAT PENDIDIKAN PENJENJANGAN	JUMLAH	%
1.	Diklatpim IV (Adum dan Adumla)	35	67,31
2.	Diklatpim III (SPAMA)	14	26,92
3.	Diklatpim II (SPAMEN)	2	3,85
4.	Diklatpim I (SPATI)	1	1,92
<b>JUMLAH</b>		<b>52</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

Data pada Tabel 2.4. menggambarkan bahwa pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 52 orang atau 37,95% dari total pegawai negeri sipil. Secara sederhana gambaran pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat dilihat gambar berikut ini:

Gambar 2.5.

Tingkat Pendidikan Penjenjangan PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2017



e. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.5.

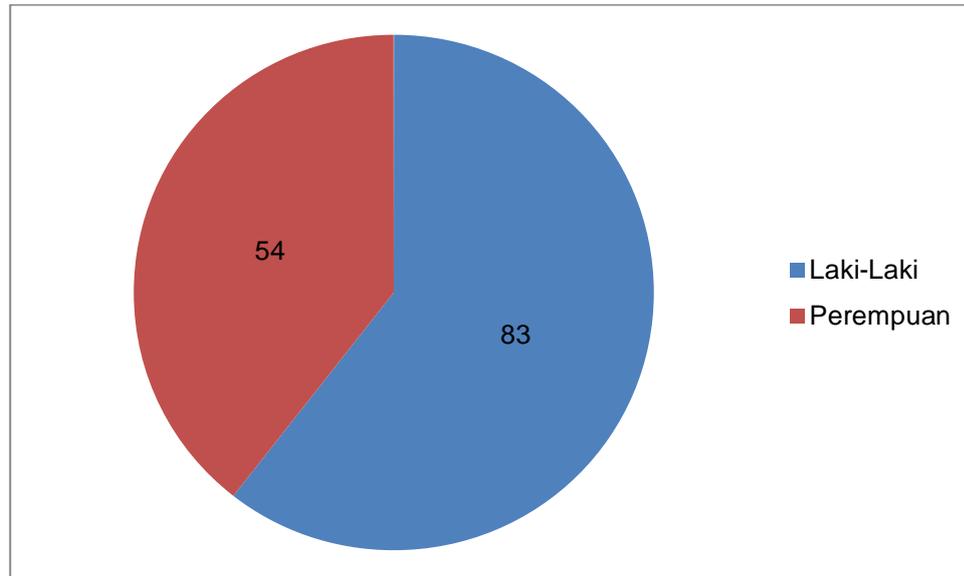
Keadaan PNS BKD Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1.	Laki-Laki	83	60,58
2.	Perempuan	54	39,42
JUMLAH		137	100,00

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

Data pada Tabel 2.5. menggambarkan bahwa pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau didominasi jenis kelamin laki-laki yang mencapai 107 orang atau 65,64%. Secara sederhana gambaran dapat dilihat gambar berikut ini:

Gambar 2.6.  
Keadaan PNS BKD Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin



### 2.2.2. Sarana Prasarana

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Daerah Provinsi Riau tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan organisasi, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai.

Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Riau.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, memiliki 2 lokasi gedung perkantoran, yaitu:

- a. Kantor Pusat, di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru, yang terdiri dari 4 (empat) gedung lantai II, 1 (satu) musholah 1 (satu) unit rumah kopel, 1(satu) unit

- kantin, 2 (dua) unit tempat parkir roda dua, 1 (satu) unit ruang genset, serta 1 (satu) unit tempat pembakaran berkas atau sampah perkantoran;
- b. Kantor Unit Pelaksanan Teknis Penilaian Kompetensi, di Jalan Amir Hamzah Pekanbaru, yang terdiri dari 1 (satu) gedung perkantoran.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 2.6.

Keadaan Prasarana dan Sarana BKD Provinsi Riau Tahun 2017

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
		JENIS BARANG	UNIT
1.	Tanah dan Bangunan	3	317.092 m <sup>2</sup>
2.	Alat-Alat Angkutan	2	4 Unit
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	54	2.879 Unit
4.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	18	152 Unit
5.	Alat Laboratorium	4	32 Unit

*Sumber Data : Buku Inventaris Barang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017*

Setiap ruang kerja pegawai negeri sipil, ruang belajar mengajar dan asrama peserta pendidikan dan pelatihan dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC). Disamping itu disetiap ruang tersebut, juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, mesin photo copy, scanner serta jaringan WiFi.

Khusus pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional roda 4 (empat) dan staf operasional disediakan kendaraan roda 2 (dua).

### **2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam kurun waktu tahun 2009-2016 telah melaksanakan terdapat 9 (sembilan) program yaitu:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c. Program peningkatan disiplin aparatur;
- d. Program fasilitasi pindah tugas Pegawai Negeri Sipil;
- e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- f. Program pendidikan kedinasan;
- g. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan;
- h. Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
- i. Program pelayanan adminitrasi aparatur sipil negara; dan
- j. Program peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil.

Selanjutnya 9 (sembilan) program tersebut masing-masing dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang secara totalitas lebih kurang mencapai 138 kegiatan. Masing-masing kegiatan ada yang dilakukan secara terus-menerus (*continue*) dan tidak terus-menerus (terputus/ parsial) untuk selama 5 (lima) tahun (2009-2013) dan lebih kurang 212 kegiatan untuk tahun (2014-2016). Kegiatan yang sifatnya parsial disebabkan oleh tuntutan dan perubahan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan dan menyelenggarakan fungsinya sebagai Perangkat Daerah, pada dasarnya hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan urusan penunjang. Oleh karena itu BKD Provinsi Riau hanya menggunakan Indikator Sasaran OPD dalam melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang kepegawaian. Sehingga tidak menggunakan Tabel T-C.23. untuk disajikan pada bab II ini.

Tabel 2.7.

## Anggaran dan Realisasi Pelayanan BKD Provinsi Riau Tahun 2009-2013

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Pertumbuhan (%)	
				Anggaran	Realisasi
2009	25.243.530.294	24.738.659.688	98%		
2010	25.515.243.133	24.530.354.748	96%	1%	1%
2011	36.186.013.267	28.525.549.655	79%	42%	16%
2012	58.084.814.629	32.202.608.844	55%	61%	13%
2013	52.300.113.225	42.775.940.181	82%	-10%	33%
<b>Rata-rata</b>	<b>197.329.714.548</b>	<b>152.773.113.116</b>	<b>77%</b>		

Sumber Data : Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2013-2018

Tabel 2.8

## Anggaran dan Realisasi Pelayanan BKD Provinsi Riau tahun 2014-2016

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Pertumbuhan (%)	
				Anggaran	Realisasi
2014	49.445.313.354	34.103.307.177	69%		
2015	75.510.323.215	52.236.997.181	69%	34%	34%
2016	63.100.768.001	60.083.887.421	95%	-19%	13%
<b>Rata-rata</b>	<b>188.056.404.570</b>	<b>146.424.191.779</b>	<b>77%</b>		

Sumber Data : Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2016

Tabel 2.9. Realisasi Capaian Belanja BKD Provinsi Riau Berdasarkan RENSTRA Tahun 2009-2013

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	46,9%	100,00%	95,00%	100,00%
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,95%	75,1%	100,00%	95,00%	100,00%
		c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	98,12%	74,7%	100,00%	95,00%	95,00%
		d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	68,81%	98,5%	100,00%	95,00%	100,00%
		e.					
		f. Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00%	87,0%	100,00%	95,00%	100,00%
		g. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	74,28%	61,7%	100,00%	95,00%	100,00%
		h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	99,15%	97,8%	100,00%	95,00%	100,00%
		i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	99,3%	100,00%	95,00%	100,00%
		j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	97,23%	43,2%	-	-	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
		k. Penyediaan Makanan dan Minuman	100,00%	95,5%	100,00%	95,00%	100,00%
		l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	99,79%	96,6%	100,00%	95,00%	100,00%
		m. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,21%	89,1%	-	-	-
		n. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	-	-	-	95,00%	100,00%
		o. Pameran Riau Expo	-	-	100,00%	100%	100,00%
		p. Pengelolaan Humas BKD	-	-	-	-	80,00%
		q. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	-	100,00%	95,00%	-
		r. Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani	-	-	100,00%	95,00%	-
		s. Pengelolaan Perencanaan Penganggaran BKD Provinsi Riau	-	-	-	95,00%	-
2.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	95,90%	99,3%	-	-	-
		b. Pengadaan Meubelier	-	84,5%	100,00%	100,00%	100,00%
		c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	66,41%	99,5%	-	-	13,00%
		d. Pembangunan DED Gedung Asrama dan Barak UTP Diklat	-	89,5%	-	-	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
		e. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	100,00%
		f. Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	100,00%	95,00%	-
		g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100,00%	-	-	-	100,00%
		h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	97,43%	-	100,00%	95,00%	100,00%
		i. Rehabilitasi ruangan kantor UPT Balai Diklat	-	-	-	100,00%	-
		j. Pengadaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	95,00%	-
		k. Pembangunan Kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya	-	-	85%	35,00%	99,90%
		l. Rehabilitasi Gedung Kantor BKD Provinsi Riau	-	-	100,00%	-	77,78%
		m. Pembangunan Gedung Sarana Penunjang 2 (dua) lantai	-	-	-	-	100,00%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	98,24%	97,6%	-	-	100,00%
		b. Pengadaan Pakaian Melayu Beserta Perlengkapannya	-	97,3%	-	-	-
		c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	98,24%	-	-	-	-
		d. Pengadaan Pakaian Korpri	97,91%	-	-	-	100,00%
		e. Pelaksanaan Sumpah janji PNS	-	-	-	-	100,00%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
		f. Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Kelengkapannya	-	-	100,00%	-	-
4.	Program Fasilitas Pindah Tugas PNS	a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	100,00%	100,0%	-	-	-
		b. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	99,74%	100,0%	100,00%	95,00%	98,00%
		c. Pelatihan Berwiraswsata Kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	98,42%	99,0%	100,00%	100,00%	100,00%
		d. Pembangunan Aplikasi Pensiun Otomatis	100,00%	-	-	-	-
		e. Pengelolaan Pensiun PNS	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
		f. Orientasi Pegawai Negeri Sipil Purna Bhakti	-	-	-	-	100,00%
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Diklat Prajabatan CPNS Gol. III Ex Honoror	-	93,1%	100%	-	-
		b. Diklat Prajabatan CPNS Gol III Ex Umum	-	87,8%	100,00%	85,00%	-
		c. Diklat Prajabatan CPNS Gol I dan II Ex Honoror	-	90,0%	100,00%	-	-
		d. Diklat Prajabatan CPNS Gol I dan II Ex Umum	68,24%	94,5%	100,00%	100,00%	-
		e. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM III)	80,15%	80,9%	100,00%	100,00%	100,00%
		f. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	-	88,0%	100,00%	100,00%	100,00%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
		(PIM IV)					
		g. Diklat Teknis Komputer 1 Angkatan	82,40%	91,9%	-	-	-
		h. Diklat Bendaharawan Daerah	-	93,7%	-	-	100,00%
		i. Pengelolaan Data Kepegawaian PNS	-	95,5%	-	100,00%	75,00%
		j. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	94,67%	98,3%	100,00%	50,00%	95,00%
		k. Pengambangan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik (E-Documen)	-	94,1%	100,00%	50,00%	80,00%
		l. Pengelolaan Website Badan Kepegawaian Dearah	-	98,2%	100,00%	95,00%	96,00%
		m. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	100,00%	22,9%	100,00%	20,00%	80,00%
		n. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	-	22,7%	100,00%	95,00%	95,00%
		o. Diklat Luar Negeri (Singapura I)	-	971,3%	100,00%	35,00%	50,00%
		p. Diklat Luar Negeri (Singapura II)	-	97,1%	-	-	-
		q. Diklat Teknis Bahasa Inggris	100,00%	-	100,00%	-	100,00%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
		r. Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah (PIM IV) dan Seleksi Calon peserta	80,80%	-	-	-	-
		s. Performance Management For The Public Sector	100,00%	-	-	-	-
		t. Public Government Administration	100,00%	-	-	-	-
		u. Seleksi Diklatpim III	98,32%	98,20%	-	-	-
		v. Seleksi Diklatpim IV	97,25%	99,00%	-	-	-
		w. Pengelolaan Data Kepegawaian di Lingkungan Pemprov Riau	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
		x. Bintel Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian	100,00%	95,50%	-	-	-
		y. Bintel Peraturan Izin Perkawinan dan Perceraian PNS	100,00%	-	-	-	-
		z. Try Out bagi Alumni SCP	-	-	100,00%	100,00%	50,00%
		aa. Penyediaan jasa kesehatan jasmani/rohani Pegawai	-	-	-	-	100,00%
		bb. Pendidikan, pelatihan, kursus, dan bimtek PNS BKD	-	-	-	-	100,00%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	98,36%	99,6%	100,00%	95,00%	100,00%
		b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	100,00%	99,5%	100,00%	95,00 %	100,00%
		c. Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%	74,8%	-	85%	100,00%
		d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100,00%	100,0%	-	85,00%	100,00%
		e. Penyusunan LAKIP	99,89%	98,8%	-	95,00%	100,00%
		f. Penyusunan Laporan Tahunan	-	-	-	95,00%	100,00%
		g. Penyusunan Rencana kerja ( renja ) OPD	-	-	-	100,00%	100,00%
		h. Penyusunan / Revisi Renstra BKD Provinsi Riau	-	-	100,00%	-	-
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	a. Pemberian Penghargaan PNS yang Berprestasi	100,00%	99,7%	100,00%	-	100,00%
		b. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan dinas	80,25%	61,6%	100,00%	95,00%	75,00%
		c. Pengadaan Calon PNS	-	57,4%	40,00%	20,00%	50,00%
		d. Penanganan Kasus-Kasus kepegawaian	-	99,5%	100,00%	95,00%	80,00%
		e. Seleksi Penerimaan S2, S3 IPDN	100,00%	99,4%	100,00%	95,00%	100,00%
		f. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	-	99,8%	100,00%	100,00%	75,00%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
		g. Pengelolaan Kartu Istri/Suami	100,00%	100,0%	100,00%	-	-
		h. Pengelolaan Kartu DP3	-	99,1%	100,00%	-	-
		i. Pengelolaan Kartu DUK	-	-	100,00%	95,00%	20,00%
		j. Pengelolaan Administrasi kepegawaian	-	-	-	95,00%	70,00%
		k. Pengelolaan Kartu Pegawai PNS	-	100,0%	-	-	-
		l. Pengelolaan Kartu Elektronik Pegawai PNS	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
		m. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010	-	-	-	100,00%	90,00%
		n. Pengelolaan Cuti PNS	-	-	100,00%	-	-
		o. Pemantauan Disiplin PNS	-	100,0%	100,00%	-	-
		p. Satya Lencana Karya Satya	-	99,9%	100,00%	95,00%	100,00%
		q. Terlaksananya Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	99,49%	94,2%	100,00%	100,00%	100,00%
		r. Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau	99,09%	91,4%	100,00%	95,00%	-
		s. Advokasi terhadap Penyelenggaraan tugas Aparatur Pemerintahan	-	-	100,00%	-	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
		t. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural/Fungsional di Lingkungan Provinsi Riau	-	97,3%	100,00%	90,00%	70,00%
		u. Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural/Fungsional di Lingkungan Sekretaris Dearah dan Jabatan Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau	-	95,2%	100,00%	85,00%	70,00%
		v. Sosialisasi Pemanfaatan Taperum, Taspen, dan Askes di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau	-	99,5%	-	-	-
		w. Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemda Provinsi Riau	90,32%	99,9%	100,00%	95,00%	90,00%
		x. Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS	50,60%	-	-	-	-
		y. Terlaksananya Penempatan PNS	100,00%	-	-	-	-
		z. Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau.	-	-	-	95,00%	80,00%
		aa. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	99,14%	-			
		bb. Terlaksanananya Pelaksanaan Ujian Dinas dan	0,00%	100,00%	-	-	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
		Penyesuaian Ijazah					
		cc. Kenaikan Pangkat Otomatis	-	95,85%	-	-	-
		dd. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan, Kursus dan Bintel PNS BADP	97,48%	-	100,00%	95,00%	
		ee. Terlaksananya pengumpulan berkas penunjang kenaikan pangkat otomatis	100,00%	-	-	-	-
		ff. Terlaksananya Pembangunan Tata Naskah Elektronik (E-Document)	99,55%	-	-	-	-
		gg. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	94,95%	-	-	-	-
		hh. Terlaksananya Penyampaian Keputusan Kenaikan Pangkat Tahun 2009	99,49%	-	-	-	-
		ii. TOT Widya Iswara PNS Provinsi Riau				85,00%	
		jj. Terlaksananya Asistensi Penilaian Angka Kredit pejabat Fungsional Dokter, Drg, Bidan dan Perawat	96,21%	-	-	-	-
		kk. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	-	-	-	100,00%	100,00%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
		ll. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	98,59%	-	-	-	-
		mm. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Melalui Customer Service Excelent	91,09%	-	-	-	-
		nn. Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara Diklat	97,63%	-	-	-	-
		oo. Terlaksananya Penataan NIP PNS Hasil Konservasi	97,90%	-	-	-	-
		pp. Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesmen untuk SDM Aparatur	-	-	-	75%	100,00%
		qq. Pengelolaan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	-	-	100,00%	99,00%	-
		rr. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada PNS Purna bakti	-	-	100,00%	-	-
		ss. Rapat-rapat Tim Baperjakat Daerah Provinsi Riau	-	-	100,00%	95,00%	90,00%
		tt. Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	-	-	-	100,00%	60,00%
		uu. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	-	-	-	100,00%	70,00%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
		vv. Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	-	-	-	100,00%	50,00%
		ww. Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintahan Prov. Riau	-	-	-	100,00%	30,00%
		xx. Bimtek Formasi pegawai negeri sipil Prov.Riau	-	-	-	100,00%	-
		yy. Rapat koordinasi BKD se-Prov. Riau	-	-	-	100,00%	100,00%
		zz. Pengelolaan Humas BKD	-	-	-	95,00%	80,00%
		aaa. Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti	-	-	-	95,00%	100,00%
		bbb. Training Of Course (TOC)	-	-	-	95,00%	-
		ccc. Penyusunan Peta Jabatan Aparatur Provinsi Riau	-	-	-	95,00%	-
		ddd. Diklat Manajement of Training (MOT)	-	-	-	100,00%	100,00%
		eee. Seleksi Widyaiswara	-	-	-	95,00%	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN				
			TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
8.	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	a. Penghargaan Kepada Para Purna Bhakti	99,76%	-	-	-	-
		b. Pemberian Satyalencana Karya Satya	99,43%	-	-	-	-

Sumber Data : Laporan Tahunan Badan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2013

Tabel 2.10. Realisasi Capaian Belanja BKD Provinsi Riau Berdasarkan RENSTRA Tahun 2014-2016

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99,92%	99,59%	83,75%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,84%	67,87%	95,06%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	85,15%	95,91%	96,28%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	83,84%	79,34%	97,55%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	99,84%	31,35%	96,32%
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	99,31%	99,36%	94,48%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	96,23%	98,23%	99,27%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,99%	9,87%	-
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	67,83%	90,16%	94,54%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	68,66%	99,48%	99,49%
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	96,97%	91,27%	99,11%
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	87,72%	82,98%	99,15%
		Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)	86,46%	97,28%	98,99%
		Rapat Koordinasi BKD Se-Provinsi Riau	-	96,36%	98,86%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
2.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	91,30%	-	97,31
		Pengadaan mebeleur	40,89%	-	-
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	69,03%	99,34%	88,27%
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	100%	96,62%	92,27%
		Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	-	99,21%	99,36%
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	79,71%	98,6%
2.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	77,57%	57,52%	-
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	77,84%	-	96,12%
		Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	-	85,08%	99,01%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pemantauan Disiplin PNS	70,66%	67,39%	99,09%
		Sosialisasi PERKALAN No. 10, 11, 12 dan 13 Tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV Pola Baru	91,32%	-	-
		Penanganan kasus-Kasus Kepegawaian		89,88%	99,45%
		Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur se-Provinsi Riau		83,31%	-
		Pelaksanaan konseling Psikologi permasalahan Aparatur Sipil Negara		4,96%	99,39%
		Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau		78,09%	
		Training Motivasi Aparatur Sipil Negara			98,95%
		Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara			99,38%
		Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur			99,98%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
4.	PROGRAM: PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pembinaan fisik dan mental aparatur	96,57%		
		Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK Pegawai BKD	66,44%		
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah(PIM I)	70,02%		
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	56,62%		
		Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)	3,21%		
		Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	70,86%		
		Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III	82,78%		
		'Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II	75,15%		
		Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	73,46%	42,33%	92,07%
		Assessment Center Provinsi Riau	71,28%		
		Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46	82,83%		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Tahun 2011			
		Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau	93,64%		
		Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga	93,12%		
		Diklat Kompetensi dan Pengembangan widyaiswara	-	40,41%	94,79%
		Diklat TOT Widyaiswara		7,96%	
		Diklat training of Fasilitatot (TOF)		-	
		Diklat Training Oficer Causer (TOC)		55,42%	92,28%
		Diklat Management of Training (MOT)		53,50%	97,12%
		Diklat Luar Negeri (kerjasama dengan Singapore)		-	
		Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau		74,58%	93,06%
		Diklat analisis kebutuhan diklat		84,41%	87,69%
		Diklat Analisis Jabatan dan Beban Kerja		86,46%	99,77%
		Diklat teknis penilaian aset milik daerah		85,57%	99,82%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Diklat teknis administrasi kearsipan		98,88%	73,57%
		Diklat teknis penusunan Tata naskah dinas		84,76%	95,48%
		Diklat teknis asministrasi kepegawaian		85,81%	91,41%
		Diklat teknis penyusunan standar operesional prosedur		92,87%	99,96%
		Diklat teknis Perumusan standar kompetensi		69,42%	92,93%
		Diklat penatausahaan keuangan daerah		84,82%	100%
		Diklat bendahara keuangan daerah		96,75%	91,27%
		Diklat pengelolaan aset daerah		103,63%	100%
		Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governace		93,28%	96,06%
		Diklat perencanaan tingkat dasar		69,01%	94,98%
		Diklat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)		85,67%	99,56%
		Diklat bahasa inggris (TOEFL)		6,44%	97,55%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Diklat pengembangan potensi akademik		-	
		Pelatihan dan peningkatan kapasitas assesor		35,18%	
		Diklat pengembangan good governance		67,41%	86,48%
		Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi			99,02%
		Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah			97,25%
		Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau			93,12%
		Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang			58,25%
		Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur			98,41%
		Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional kepeg			76,99%
		Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Peneliti			80,88
		Orasi Ilmiah Widyaiswara			82,44
		Seleksi Asesor Provinsi Riau			88,74%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau			96,59
5.	PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	73,31%	88,98%	100%
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	98,41%	99,68%	100%
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	97,89%	93,18%	100%
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	98,10%	99,98%	99,03%
		Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) OPD	66,69%		92,01%
		Penyusunan rencana kerja (RENJA) OPD	59,37%	92,93%	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	64,57%	81,15%	99,73%
		Pelaporan Barang Milik Daerah	99,93%	100%	100%
		Monitoring Evaluasi Program dan pelaporan		91,22%	
6	PROGRAM : Fasilitasi Pindah/Purna	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	96,35%		
		Pengelolaan Pensiun PNS	78,65%		
		Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti	1,90%		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
	Tugas PNS	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	89,32%		
5	PROGRAM : Pendidikan Kedinasan	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	35,09%		
		Monitoring IPDN	95,83%		
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	26,16%		
		Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara	47,68%		
		Diklat TOT Widyaiswara	6,07%		
		Diklat Substansi Bagi Widyaiswara Pola Baru (TOF)	9,78%		
		Diklat Substansi Materi Penguasaan Diri	-		
		Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara		51,21%	96,56%
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)		-	43,42%
		Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)		28,26%	84,56%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Pendidikan dan pelatihan strukturan bagi PNS Daerah (PIM III)		34,68%	91,98%
		Pendidikan dan pelatihan bagi PNS Daerah (PIM IV)		37,80%	98,01%
		Seleksi Diklat Kepemimpinan (PIM 2,3,4)		78,50%	86,72%
		Diklat Prajabatan CPNS Daerah golongan III		41,91%	100%
		Diklat Prajabatan CPNS Daerah golongan II		38,59%	
		Penunjang Pendidikan ikatan dinas			81,28%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
7	PROGRAM : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pengelolaan Data Kepegawaian	91,12%	74,05%	
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	56,76%		
		Pengembangan dan pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik (E-Dokumen)	66,64%	74,49%	
		Pengelolaan Administrasi kepegawaian	83,82%		
		Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah	88,75%	76,12%	
		Pengelolaan Daftar Urut Kependidikan (DUK)	89,04%		
		Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik PNS	82,88%		
		Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	89,92%	93,32%	100%
		Pengadaan Calon PNS	90,97%		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Pelaksanaan Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	81,37%		
		Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	76,33%		
		Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	-		
		Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	-		
		Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	-		
		Seleksi Penerimaan IPDN	100%	24,57%	
		Pemberian Beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	54,36%		
		Diklat Analisis Kebutuhan Diklat	100%		
		Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	85,79%		
		Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur	-		
		Pengelolaan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	96,41%		
		Monitoring, Evaluasi dan Orientasi pelaksanaan Administrasi	79,12%		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II			
		Rapat-rapat Tim Baperjakat Daerah Provinsi Riau	96,31%		
		Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural/Fungsional di lingkungan Pemda Propinsi Riau	86,61%		
		Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Propinsi Riau	96,61%		
		Pengelolaan Kenaikan pangkat PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Riau	89,64%		
		Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau	94,99%		
		Penyusunan SOP dan SPP Badan Kepegawaian dan Diklat	83,65%		
		Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender	85,60%		
		Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian	80,92%		
		Peningkatan sumber daya aparatur dengan	97,43%		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Emotional Spiritual Quotient Training			
		Satya Lencana Karya Satya	29,44%		
		Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik	100%		
		Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	93,95%		
		Diklat Teknis Komputer	94,23%		
		Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	91,21%		
		Diklat Teknis Bahasa Inggris	86,04%		
		Diklat Teknis Administrasi Kearsipan	93,24%		
		Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	96,37%		
		Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	95,16%		
		Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	-		
		Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan	89,16%		
		Pengadaan E Government Manajemen	-	5,47%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Kepegawaian Provinsi Riau			
		Rakor Widya Iswara	83,24%		
		Pengelolaan Humas BKD	61,98%	92,04%	
		Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah		97,40%	93,67%
		Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi			99,89%
		Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa			98,07%
		Satya Lencana Karya Satya			80,11
		Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se Provinsi Riau			97,49%
		Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi			93,09%
		Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bagi PNS Provinsi		82,77%	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara		53,48%	96,89%
		Workshop Kegiatan Bagi PPTK		91,10%	99,71%
		Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai BKD		95,05%	99,16%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD		-	98,15%
		Assesment Center Provinsi Riau		18,25%	73,84%
		Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dengan Emotional Spiritual Quotient		19,43%	100%
		Monitoring IPDN		70,38%	98,06%
		Monitoring Dan Evaluasi Kediklatan Aparatur Sipil Negara		92,19%	100%
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011		90,56%	97,35%
		Pengadaan Aparatur Sipil Negara		24,75%	96,12%
		Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah		90,19%	99,82%
		Rakor Widya Iswara		44,47%	95,49%
		Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat		-	87,29%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau			97,29%
		Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik			98,63%
		Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau			98,73%
		Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender			94,22%
		Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau			100%
		Bimbingan Teknis Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan			89,18%
		Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan			100%
		Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi			99,23%
		Pengadaan Modul Pembelajaran			95,09%
		Akreditasi UPT. Diklat Pegawai BKD Provinsi Riau			79,06%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Penyusunan Profil BKD Se-Provinsi Riau			99,94%
		Bimtek penyusunan Formasi pengadaan PNS Provinsi Riau		85,85%	
		Bimbingan Teknis manajemen kontrak bagi Aparatur Pemerintah Provinsi riau		59,59%	
		Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur Pemerintah provinsi riau		50,10%	
		Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010		93,65%	
		Training Motivasi Aparatur sipil negara		47,61%	
		Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi riau		75,76%	
		Pembinaan Fisik dan Mental aparatur		94,00%	
		Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, perencana aparatur		77,12%	
		Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, analisis kepegawaian		6,11%	
		Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti		-	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Monitoring, Evaluasi jabatan, Fungsional PNS Provinsi Riau		98,54%	
		Orasi ilmiah widyaiswara		-	
9	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Pengelolaan adminitrasi pindah tugas PNS se-provinsi Riau		92,92%	99,99%
		Pengelolaan Pensiun PNS		93,56%	
		Monitoring, Evaluasi dan orientasi pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat struktural Esselon II		77,38%	
		Pengelolaan Administrasi dan Penataan jabatan Struktural tertentu di lingkungan Pemda Provinsi Riau		81,47%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Propinsi Riau Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota		82,58%	
		Pengelolaan Kenaikan pangkat PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Riau		78,24%	98,32%
		Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BK2PD Provinsi Riau		92,16%	98,24%
		Pengelolaan Administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu		82,32%	99,88%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik		94,09%	
		Pengelolaan administrasi izin belajar		92,27%	98,73%
		Pengelolaan Administrasi kepegawaian		95,13%	100%
		Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik		91,90%	99,94%
		Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau		88,30%	92,74%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja		-	
		Satya Lencana Karya Satya		21,27%	
		Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau			100%
		Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi			99,98%
		Pengelolaan Data Kepegawaian			95,27%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi			87,08%
		Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau			97,06%
		Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan			99,06%
		Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau			99,71%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RASIO TINGKAT CAPAIAN		
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
10	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Orientasi Pegawai Negeri Sipil Purna Bakti		2,95%	95,09%
		Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS		99,89%	92,53%
		Pengelolaan Pensiun PNS		2,51%	99,95%
		Monitorng dan Evaluasi Tapetarum dan Taspen PNS se Provinsi Riau		80,16%	

Sumber Data : Laporan Tahunan Badan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2016

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat dipaparkan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kepegawaian sebagai berikut:

### 1. Tantangan

Tantangan (*treaths*) bagi organisasi adalah faktor eksternal yang tidak dalam kewenangan dan mempengaruhi dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Berdasarkan analisis yang dilakukan tantangan yang mempengaruhi Badan Kepegawaian Daerah dalam pencapaian visi adalah:

#### a. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance dan clean governance*).

Masih lemahnya sistem dan tata kelola pemerintahan serta kadar profesional aparatur perlu mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Oleh karena itu, salah satu tantangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan masyarakat (publik) adalah upaya peningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara termasuk pegawai negeri sipil yang profesional dan andal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Keterbukaan atau transparansi mendorong masyarakat semakin berani untuk mengungkapkan ketidakpuasan, kritikan dan pendapat yang mereka peroleh dan rasakan atas pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu lembaga pemerintah atau aparatur sipil negara. Oleh sebab itu tuntutan masyarakat tersebut perlu disikapi oleh aparatur sipil negara dengan melakukan perubahan pola pikir (*mindset*) dan pola perilaku (*cultural set*).

#### b. Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal

Tantangan globalisasi dewasa ini berimplikasi pada perubahan berbagai tatanan kehidupan organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi perusahaan. Organisasi pemerintahan dituntut untuk mampu mewujudkan *Good Governance* atau pemerintahan yang amanah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang optimal

di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sementara itu organisasi perusahaan atau swasta harus menghadapi persaingan usaha yang ketat, sehingga tidak saja berupaya untuk memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, tetapi juga harus dapat meningkatkan kemampuan organisasinya untuk tetap berkembang dalam situasi persaingan yang terus meningkat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal maupun internal yang berkaitan erat dengan pengembangan dan peningkatan kemampuan organisasi, tidak terlepas dari pentingnya sumber daya manusia dalam posisinya selaku perencana, pelaksana dan pengendali atas keseluruhan aktifitas suatu organisasi. Dinamika perubahan tersebut melewati batas ruang antar bangsa dan negara di dunia tanpa kecuali termasuk negara Indonesia, dimana tuntutan perubahan telah melahirkan Era Reformasi dalam system penyelenggaraan pemerintahan, yakni pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dimana posisi Pemerintah Daerah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka perlu adanya penataan ulang berbagai elemen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, karena pada dasarnya tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang diawali dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan awal terjadinya perubahan paradigma pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem pemerintahan desentralisasi, tidak terlepas dari implikasi globalisasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pada era pemerintahan desentralisasi dewasa ini, Pemerintah Daerah mempunyai hak otonomi yang lebih luas, lebih nyata dan lebih bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangga daerahnya sendiri. Daerah mempunyai kewenangan merumuskan berbagai kebijakan di bidang pemerintahan,

kemasyarakatan dan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Sekurang-kurangnya ada 4 (empat) tujuan pelaksanaan Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah :

- Memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih cepat, murah dan berkualitas.
- Meningkatkan daya saing dan kemampuan kompetitif daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya manusia dalam rangka lebih mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.
- Meningkatkan kemampuan dan peran serta daerah untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang tersedia, prioritas kebutuhan masyarakat dan karakteristik sosial yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai subyek dalam proses pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan sasaran atau tujuan tersebut diatas diperlukan upaya pembinaan aparatur pemerintah daerah, sehingga dapat bekerja secara profesional dan manajemen pelayanan umum (*public service*) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam konteks ini maka yang perlu dikedepankan oleh Pemerintah Daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membangun, meningkatkan dan mendayagunakan kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standart pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat.

Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan otonomi secara efisien dan efektif, maka kepada daerah diberikan kewenangan yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib, adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu : pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana

lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan potensi unggulan dan kekhasan daerahnya masing-masing. Pemberdayaan birokrasi disini lebih difokuskan kepada pemberdayaan aparatur pemerintah, dimana Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan pengendali pelaksanaan pembangunan dituntut untuk memiliki kemampuan managerial yang optimal. Disamping itu Pegawai Negeri harus memiliki perilaku, keterampilan dan tingkat intelektual yang dapat dijadikan panutan dan tauladan, terutama dalam menjalankan fungsi-fungsinya selaku aparatur pemerintah, meliputi : fungsi pelayanan (service), fungsi pengaturan (regulation), fungsi pembangunan (development), fungsi pemberdayaan (empowering), dan fungsi perlindungan (protection).

Pegawai Negeri sebagai bagian dari sumber daya aparatur perlu dikembangkan, didorong dan ditumbuhkan prakarsa dan kreativitas untuk mampu menunjukkan disiplin, kinerja dan produktivitas kerja yang optimal dalam menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan publik di bidang pembangunan, pemerintahan dan masyarakat.

Pengembangan daerah dalam melaksanakan pendelegasian wewenang serta anggaran dari pusat ke daerah dalam bentuk otonomi menjadi kesempatan sekaligus momok menakutkan apabila tak bisa dikelola dengan baik, apalagi dengan banyaknya kebutuhan serta keinginan masyarakat di daerah yang perlu untuk diperhatikan dan berimplikasi pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pengambil keputusan. Kinerja pegawai menjadi salah satu hal yang paling dituntut dalam pelaksanaannya, apakah sudah benar benar melihat kebutuhan masyarakat dalam memberi pelayanan dan mengambil keputusan.

c. Belum optimalnya pembinaan kedisiplinan pegawai

Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung

jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Pegawai negeri yang sempurna adalah pegawai negeri yang penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama aparatur negara. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin yang tinggi merupakan salah satu unsur untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna. Disiplin yang tinggi diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia, permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah PNS Daerah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh. Sebuah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tentang birokrasi dinyatakan bahwa mereka, Pegawai Negeri Sipil Daerah kerja santai, pulang cepat dan mempersulit urusan serta identik dengan sebuah adagium "*mengapa harus dipermudah apabila dapat dipersulit*".

Begitu parahnya pandangan masyarakat mengenai Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang melaporkan, 55 persen dari total Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencapai sekitar 3,6 juta orang berkinerja buruk. Para pekerja ini hanya mengambil gajinya tanpa berkontribusi berarti terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu, pemerintah akan menawarkan relokasi dan pendidikan tambahan. Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pembangunan yang sedang giat dilakukan di Indonesia sering mengalami banyak hambatan dan permasalahan yang cukup kompleks. Hal tersebut dapat

menimbulkan ketidak tertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan disiplin dalam lingkungan aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidak tertiban tersebut.

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pemerataan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- d. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen pelayanan Aparatur Sipil Negara

Menyadari peranan Aparatur Negara yang sangat strategis, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 terdapat perubahan yang cukup radikal dibandingkan dengan peraturan kepegawaian sebelumnya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pokoknya ditujukan untuk membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan-perubahan di atas juga dimaksudkan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian reformasi birokrasi, serta menjawab tuntutan di lingkup nasional dan tantangan yang bersifat global. Dalam kaitan di atas, beberapa perubahan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara mencakup hal-hal sebagai berikut:

### **Pengadaan PNS**

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun formasi, yaitu jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu

tertentu. Penyusunan formasi dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode analisis beban kerja dan/atau metode lainnya serta membandingkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dengan persediaan yang ada. Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas dan penyusunan tersebut dilakukan setelah penetapan rencana strategis instansi. Sementara itu, dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan (orientasi) melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

### **Pengembangan Karier**

Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah. Setiap instansi diwajibkan menyusun rencana pengembangan karier, melalui pola karir (*career path*) yang didasarkan atas *merit system*. Pelaksanaan pola karie Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah; berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi. Disisi lain, Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Pengembangan kompetensi juga dilakukan dengan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, juga bisa dilakukan melalui pertukaran antara Pegawai Negeri Sipil dengan pegawai swasta paling lama 1 (satu) tahun.

### **Gaji dan Perlindungan**

Pemerintah wajib memberikan gaji yang adil dan layak serta menjamin kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil. Pertimbangan dalam sistem penggajian adalah didasarkan pada beban kerja, resiko, dan tanggung jawab kerja. Selain gaji, Pegawai Negeri Sipil juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan tersebut meliputi Tunjangan Kinerja (sesuai pencapaian kinerja) dan Tunjangan Kemahalan. Dalam hal pemberian penghasilan Pegawai Negeri Sipil, dasar penentuannya tidak lagi dipukul rata. Setiap Pegawai Negeri Sipil akan digaji berdasarkan pangkat jabatan dan akan diberikan tunjangan kinerja sesuai capaian kinerjanya. Selain gaji dan tunjangan, Pegawai Negeri Sipil berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan yang berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum.

### **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**

Pada umumnya pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dikarenakan telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), yaitu 58 tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi. Namun demikian, Pegawai Negeri Sipil juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, melakukan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, menjadi anggota/pengurus partai politik, atau melakukan tindak pidana berencana.

### **Kelembagaan**

Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Dalam penyelenggaraan kekuasaannya, Presiden dibantu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan lembaga baru yang dibentuk yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN merupakan lembaga mandiri yang bebas dari intervensi politik yang mempunyai

kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Tinggi dan mengawasi serta mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, dan implementasi *merit sistem*.

Secara kualitas, pembangunan sumber daya manusia aparatur sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing aparatur negara dalam mengimplementasikan program-program pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, dinamis, dan sesuai dengan tuntutan kondisi pembangunan, maka diperlukan perubahan paradigma manajemen kepegawaian yang sebelumnya lebih menekankan kepada hak dan kewajiban individual pegawai ke arah perspektif baru yang lebih menekankan kepada manajemen pengembangan sumber daya manusia yang strategis (*strategic human resource management*).

Pencapaian tujuan bernegara harus didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berintegritas, jujur, berkinerja tinggi dan akuntabel, sehingga mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis yang berorientasi kepada masyarakat. Selain itu, Reformasi Birokrasi ditujukan untuk penyempurnaan system manajemen ASN yang dapat memacu peningkatan profesionalisme, integritas, jujur, berkinerja tinggi, netral, akuntabel dan sejahtera serta yang dapat memacu produktivitas kerja aparatur.

- e. Penempatan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kompetensinya  
Dalam UU tentang ASN telah disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak yang sama untuk dikembangkan kompetensinya. Konsekuensinya adalah setiap organisasi pemerintah wajib menyusun program dan kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawainya. Sebagai timbal balik, bagi Pegawai ASN yang dikembangkan kompetensinya wajib memberikan kompetensi terbaik, inisiatif, motivasi dan kesediaan untuk memikul beragam peran dan tanggung jawab dalam organisasi.

Setiap pegawai ASN memiliki pengalaman, profil kompetensi, kualifikasi, keahlian, dan potensi sendiri-sendiri yang terkadang berbeda antar pegawai ASN sehingga berdampak pada program dan kebutuhan pengembangan kompetensi yang berbeda-beda untuk tiap Pegawai ASN. Identifikasi kebutuhan pengembangan SDM diperlukan agar program dan kegiatan pengembangan aset SDM tepat sasaran, efektif dan efisien. Identifikasi kebutuhan tidak hanya dilakukan di level organisasi dan unit kerja, tetapi juga perlu dilakukan untuk tiap-tiap Pegawai ASN dengan tetap mempertimbangkan pengembangan karier pegawai.

Untuk melakukan identifikasi pegawai guna mendapatkan data profil pegawai terkait pengalaman kerja, profil kompetensi, kualifikasi, keahlian, dan potensi perlu dilakukan pemetaan terhadap pegawai dalam organisasi. Pemetaan pegawai salah satunya dapat dilakukan melalui *assessment* kompetensi dan potensi pegawai. Dengan data pegawai yang diperoleh melalui *assessment* kompetensi dan potensi, organisasi dapat mengidentifikasi pegawai yang kompeten dan potensial untuk memberikan prestasi puncak organisasi. Selain itu, data hasil *assessment* dapat dijadikan bahan dalam melakukan pengembangan SDM dan melaksanakan manajemen talenta untuk mengelola pegawai-pegawai terbaik dalam organisasi, melakukan perencanaan suksesi serta menyiapkan calon-calon potensial pegawai yang dapat diberikan tanggung jawab dalam jabatan manajerial/struktural maupun profesional/fungsional. Selain itu, pelaksanaan *assessment* kompetensi dan potensi pegawai juga mendukung manajemen SDM berbasis kompetensi dalam organisasi.

- f. Seleksi uji kompetensi yang profesional dalam penempatan jabatan  
Akses negatif dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dalam pembinaan dan manajemen kepegawaian adalah munculnya bentuk pembinaan dan manajemen kepegawaian *spoil system* atau imbal jasa, dalam komponen-komponen pembinaan mulai dari rekrutmen, promosi dan mutasi. Pihak-pihak yang memberikan kontribusi terhadap kedudukan seorang kepala daerah, meminta imbal jasa dalam

pembinaan dan manajemen kepegawaian. Hal ini ditentukan tidak sesuai dengan norma dan pola pembinaan dan manajemen kepegawaian yang mengedepankan profesionalisme, kapasitas dan kinerja. Pola ini dalam beberapa tahun terakhir sangat subur dan berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dampak negatif dari hal ini akan dirasakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan dari para aparatur sipil negara yang kurang mengedepankan profesionalisme dalam bekerja. Maka berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana pelaksanaan penempatan jabatan dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas. Melalui metode pelaksanaan Assessment Center dengan penilai uji kompetensi diharapkan seleksi yang dilakukan bisa lebih profesional.

## 2. Peluang

Peluang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dalam mengemban misi kepegawaian melalui pencermatan dan analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung program pembinaan, manajemen dan pelayanan kepegawaian. Dengan pencermatan tersebut memungkinkan secara kontinue dan konsisten mengemban pelaksanaan tugas pokok guna mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Adapun peluang kedepan dalam pembinaan, manajemen dan pelayanan kepegawaian adalah:

### a. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Secara esensi perubahan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah:

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara harus memiliki profesi dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada sistem merit, yaitu adanya perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan,

penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

- 2) Manajemen Aparatur Sipil Negara yang terdiri manajemen pegawai negeri sipil dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur;
- 3) Dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mandiri dan bebas dari intervensi politik dengan tujuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara dan menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku aparatur Sipil Negara.

b. Pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui perbaikan dan perubahan pada 3 (tiga) aspek/pilar birokrasi, yaitu kelembagaan, ketalaksana, dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu aspek yang menjadi fokus reformasi adalah aparatur penyelenggara birokrasi yang sebagian besar terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang didalamnya terdapat Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu peluang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau untuk berperan melalui pembinaan yang berlandaskan pada sistem manajemen kepegawaian yang lebih berdaya semakin diperlukan.

c. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara.

Pengembangan kapasitas aparatur sipil negara tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Tetapi hal ini dapat dilakukan dengan berkerjasama dengan pihak ketiga yang menawarkan program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara.

Terdapat beberapa pihak ketiga yang dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, yaitu:

- 1) Kementerian/Kelembagaan yang memiliki program dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara antara lain:
    - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
    - Badan Kepegawaian Negara;
    - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
    - Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
    - Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;
  - 2) Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang menyelenggarakan pendidikan formal sarjana strata satu (S.1), sarjana dua (S.2) dan sarjana strata tiga (S.3);
  - 3) Lembaga-lembaga pendidikan dari pemerintah negara lain, seperti *Australia Award*, *Jepang Indonesia Cooperative Association (JICA)*, Kementerian Luar Negeri Singapore melalui *Civil College Services*);
  - 4) Lembaga Non Pemerintah atau Lembaga Sosial Masyarakat yang bergerak dibidang peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Dalam hal ini termasuk pihak swasta dalam negeri yang menyediakan anggaran peningkatan kapasitas aparatur sipil negara; Disamping peningkatan kapasitas aparatur sipil negara kerjasama dapat juga dibangun dibidang peningkatan sarana dan prasarana yang pendidikan dan pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.
- d. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik *government (e.government)* dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Kemajuan teknologi informasi secara langsung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Dengan penerapan *e.government* dalam memacu semakin baik dan cepatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh aparatur sipil negara. Disamping itu *e.government* dapat membangun penyelenggaraan pelayanan semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Bagi negara, pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah yang enggan untuk menerapkan *e.government* akan tidak memiliki daya

saing, yang pada akhirnya berdampak terhadap eksistensi kelembagaannya. Oleh sebab itu kedepan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah secara kontinue dan bertahap akan meningkatkan penerapan *e government* dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga output yang dihasilkan dapat memuaskan pelanggan, yaitu pegawai negeri sipil dan masyarakat umum lainnya.



**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**

Permasalahan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau saat ini adalah kompetensi sumberdaya manusia yang belum mencukupi kebutuhan, belum optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara, masih rendahnya tingkat disiplin pegawai, kualitas pelayanan Adminitrasi Kepegawaian yang belum optimal.

Tabel 3.1.  
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
 Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kompetensi Sumberdaya Manusia	Kurangnya Kompetensi Sumberdaya Manusia	1. Kebutuhan jenis diklat yang diikuti terbatas; 2. Belum adanya data kebutuhan kompetensi SDM
2.	Penataan Pegawai	Belum optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara	1. Implementasi dan pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Belum Akuratnya Data Pegawai
3.	Disiplin Pegawai	Rendahnya dispilin	Keterbatasan SDM

		pegawai	dalam melakukan pemantauan ASN
4.	Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian	Terbatasnya Sarana dan Prasarana guna mendukung kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut alat ukur yang digunakan dengan menggunakan metode analisa SWOT. Analisa yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:

#### 1. Analisa Internal

Analisa internal merupakan analisa yang menguraikan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 3.2.  
Kekuatan dan Kelemahan BKD Provinsi Riau

Kekuatan	Kelemahan
1. Eksistensi kelembagaan yang cukup kuat melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;	1. Sarana Prasarana belum memadai;
2. Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara;	2. Belum optimalnya implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Penerapan <i>E-Government</i> oleh pemerintah;	3. Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara yang belum optimal;
4. Adanya Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi sebagai pusat assessment center	4. Belum Akuratnya Data Pegawai;
	5. Masih rendahnya kedisiplinan pegawai;
	6. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal.

<p>5. Jumlah atau kuantitas sumber daya manusia pelaksana teknis sudah memadai;</p> <p>6. Adanya kondisi kerja yang kondusif antar pimpinan dan staf;</p> <p>7. Kesejahteraan pegawai yang memadai.</p>	
---	--

*Sumber Data : Hasil focus group discussion Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau*

## 2. Analisa Eksternal

Analisa eksternal merupakan analisa yang mengidentifikasi kondisi lingkungan diluar organisasi yang menguraikan peluang (opportunity) dan tantangan (threats) yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan.

Tabel 3.3.  
Tantangan dan Peluang BKD Provinsi Riau

Tantangan	Peluang
<p>1. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan baik (<i>good governance dan clean governance</i>);</p> <p>2. Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal;</p> <p>3. Belum optimalnya pembinaan kedisiplinan pegawai;</p> <p>4. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen pelayanan Aparatur Sipil Negara;</p> <p>5. Penempatan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kompetensinya;</p> <p>6. Seleksi uji kompetensi yang profesional dalam penempatan jabatan.</p>	<p>1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>2. Pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> <p>3. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;</p> <p>4. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik <i>government (e.government)</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p>

*Sumber Data : Hasil focus group discussion Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau*

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya di Bidang Kepegawaian. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019 dinyatakan bahwa visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah ***“Terwujudnya Pemerintah Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Yang Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemanfaatan Aparatur”*** .

Untuk pencapaian visi tersebut diturunkan melalui misi Gubernur yang kelima yaitu ***“Mewujudkan Pemerintah Yang Terpercaya serta Pemanfaatan Kehidupan Politik”***.

Dari visi dan misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dengan sasaran *“Terwujudnya Good Governance and Clean Government”* dan indikator sasaran:

1. Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan, dengan indikator Opini Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Meningkatnya efektifitas dan integritas Pemerintah Daerah, dengan indikator indeks efektifitas pemerintahan dan indeks integritas pelayanan publik;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator nilai akuntabilitas;
4. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator nilai keterbukaan informasi; dan
5. Meningkatnya nilai reformasi birokrasi.

Pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tersebut diatas dilakukan melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah terkait. Dari analisis terhadap program pencapaian sasaran dari misi kelima terdapat program yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Riau, yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
2. Program Pendidikan Kedinasan Aparatur Sipil Negara;
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
4. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara; dan
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur.

Disamping itu terdapat pula 4 (empat) program pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Faktor-Faktor Penghambat :

1. Masih rendahnya kedisiplinan pegawai;
2. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur yang belum optimal;
4. Belum akuratnya data pegawai;
5. Pemetaan pegawai negeri sipil yang belum optimal;
6. Sarana prasarana yang belum optimal.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat diatas akan sangat mempengaruhi kinerja Kepala Daerah, terutama dalam mencapai indikator sasaran untuk meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi yang telah menjadi agenda nasional dan daerah.

## Faktor-Faktor Pendorong

1. Meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi atau elektronik goverment dengan penerapan absensi on line serta penerapan pelaksanaan SKP on line;
2. Meningkatkan implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan konsistensi dalam memperbelakukan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;
3. Mengoptimalkan penyusunan data base kepegawaian dengan penerapan e-goverment melalui pengembangan Sistem Aparatur ResponsibleTerpadu (SMART);
4. Mengoptimalkan pemetaan Pegawai Negeri Sipil melalui penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja dengan menjalin kerjasama pihak ketiga;
5. Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara melalui implementasi reformasi birokrasi serta penerapan e-goverment dalam pelaksanaan sistem manajemen pelayanan;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kerja dan kemajuan teknologi .

### **3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga dan Renstra Provinsi**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat, selaku lembaga pembina dalam penyelenggaraan/pelaksanaan pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara. Terdapat 4 (empat) kementerian/ lembaga yang memiliki keterkaitan langsung bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

#### **1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.**

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki *visi* “Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani” dan *misinya* “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”. Hal ini dicapai

dengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*)
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil;

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian Daerah, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

## 2. **Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia**

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas

pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah “menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 6 (enam) misi, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil;
- b. Merumuskan kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian;
- d. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian ;
- e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010-2014 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

### **3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia**

Lembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN, adalah Lembaga

Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah “Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; Peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian. Sehubungan dengan tugas pokok dan

fungsi tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak ada hubungan yang cukup signifikan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Riau yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
2. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
3. Penerapan E-Government;
4. Belum akuratnya data pegawai melalui penerapan Sistem Penilaian Kinerja secara berbasis elektronik;
5. Pemberlakuan single salary; dan
6. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Untuk menganalisa isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.  
Analisa Isu-Isu Strategis BKD Provinsi Riau

<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	<p><b><u>PELUANG:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>2. Pelaksanaan reformasi birokrasi;</li> <li>3. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;</li> <li>4. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik <i>government (e.gov)</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan;</li> </ol>	<p><b><u>TANTANGAN:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance dan clean governance</i>);</li> <li>2. Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal;</li> <li>3. Belum optimalnya pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>4. Optimalisasi penerapan Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil</li> </ol>
<b>FAKTOR INTERNAL</b>		

		Negara; 5. Seleksi uji kompetensi yang profesional dalam penempatan jabatan
<p><b><u>KEKUATAN:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksistensi kelembagaan yang cukup kuat melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;</li> <li>2. Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara</li> <li>3. Penerapan E-Government oleh pemerintah</li> <li>4. Adanya Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi sebagai pusat assessment center</li> <li>5. Jumlah atau kuantitas sumber daya manusia pelaksana teknis sudah memadai;</li> <li>6. Adanya kondisi kerja yang kondusif antar pimpinan dan staf;</li> <li>7. Kesejahteraan pegawai yang memadai;</li> </ol>	<p><b><i>ISU STRATEGIS (SO):</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan eksistensi kelembagaan untuk peningkatan pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara yang objektif , transparan dan akuntabel melalui pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;</li> <li>• Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan membangun kerja-sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara;</li> <li>• Mengoptimalkan penrapan e-goverment sebagai teknologi informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan melalui pengembangan Sistem Aparatur Responsible Terpadu;</li> <li>• Mengoptimalkan UPT Penilaian Kompetensi sebagai pusat assessment center dengan membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara ;</li> <li>• Mengoptimalkan kondisi kerja kondusif untuk mengoptimalkan pelayanan kepegawaian dengan</li> </ul>	<p><b><i>ISU STRATEGIS (ST):</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan eksistensi kelembagaan melalui peraturan gubernur tentang kode etik pegawai untuk pedoman dalam penerapan disiplin pegawai;</li> <li>• Mengoptimalkan komitmen pimpinan dalam melaksanakan penilaian uji kompetensi untuk penempatan jabatan melalui assessment ;</li> <li>• Mengoptimalkan pengembangan E-goverment dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Manajemen Aparatur Responsible terpadu untuk meningkatkan keakuratan data base pegawai serta mengoptimalkan Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur;</li> <li>• Menoptimalkan penerapan e-govermen pada Sistem Manajemen Pelayanan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (good goverment dan clean goverment);</li> <li>• Menoptimalkan UPT Penilaian Kompetensi sebagai pusat assessment center untuk pemetaan Pegawai Negari Sipil sesuai dengan kompetensinya;</li> </ul>

	<p>satu pintu dengan penerapan <i>e.government</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan tingkat kesejahteraan yang memadai untuk peningkatan pelayanan kepegawaian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan peranan sumberdaya manusia aparatur untuk penyusunan pemetaan pegawai negeri sipil yang sesuai dengan analisa beban kerja dan analisa jabatan;</li> <li>• Mengoptimalkan tingkat kesejahteraan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui e-government dengan penerapan Sistem Kinerja Pegawai Elektronik.</li> </ul>
<p><b><u>KELEMAHAN:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kedisiplinan pegawai;</li> <li>2. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>3. Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur yang belum optimal;</li> <li>4. Belum akuratnya data pegawai;</li> <li>5. Pemetaan pegawai negeri sipil yang belum optimal</li> <li>6. Sarana prasarana yang belum optimal</li> </ol>	<p><b><i>ISU STRATEGIS (WO):</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi atau elektronik government dengan penerapan absensi on line serta penerapan pelaksanaan SKP on line;</li> <li>8. Meningkatkan implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan konsistensi dalam memperbelakukan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;</li> <li>9. Mengoptimalkan penyusunan data base kepegawaian dengan penerapan e-government melalui pengembangan Sistem Aparatur ResponsibleTerpadu (SMART);</li> <li>10. engoptimalkan pemetaan Pegawai Negeri Sipil melalui penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja dengan menjalin kerjasama pihak ketiga;</li> <li>11. eningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara melalui implementasi reformasi</li> </ol>	<p><b><i>ISU STRATEGIS (WT):</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengotimalkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kedisiplinan aparatur dan peningkatan kualitas kinerja aparatur dengan penerapan penilaian kinerja (SKP) on line untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance dan clean governance</i>);</li> <li>• Mengoptimalkan pelaksanaan implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar dalam pelaksanaan uji kompetensi yang profesional dalam penempatan jabatan;</li> <li>• Meningkatkan sistem manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan E-Government dan pelayanan satu pintu agar terciptanya Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara yang professional;</li> <li>• Meningkatkan keakuratan</li> </ul>

	birokrasi serta penerapan e-government dalam pelaksanaan sistem manajemen pelayanan; 12. meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kerja dan kemajuan teknologi .	data pegawai dengan Sistem Manajemen Aparatur Responsible Terpadu dalam optimalisasi penerapan sistem manajemen pelayanan aparatur sipil negara; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan pemetaan pegawai negeri sipil untuk penempatan Aparatur Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensinya berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dalam rangka untuk menempatkan aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensinya;</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana untuk sistem manajemen pelayanan Aparatur Sipil Negara berbasis elektronik</li> </ul>
--	---	--

Sumber Data : Hasil *focus group discusion* Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016

Untuk menentukan skala prioritas terhadap isu-isu strategis, hasil analisis sebagaimana tabel 3.3. maka digunakan kriteria atau indikator sebagai berikut.

Tabel 3.5.  
Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

NO.	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20

4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
5.	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>

Sumber Data : Hasil *focus group discussion* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Dengan dengan mengacu pada indikator sebagaimana tersebut diatas diperoleh skala prioritas isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.6.

Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis BKD Provinsi Riau

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL SKOR	RATA-RATA	RANKING
		1	2	3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ISU STRATEGIS (SO):</b>										
1.	Mengoptimalkan eksistensi kelembagaan untuk peningkatan pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara yang objektif , transparan dan akuntable melalui pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;	20	10	20	10	5	20	85	14,16	I
2.	Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan membangun kerja-sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara;	10	10	10	5	5	5	45	7,50	VI

3.	Mengoptimalkan penrapan e-government sebagai teknologi informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan melalui pengembangan Sistem Aparatur Responsible Terpadu;	20	10	15	15	5	15	80	13,33	II
4.	Mengoptimalkan UPT Penilaian Kompetensi sebagai pusat assessment center dengan membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparat sipil negara ;	10	10	10	5	5	10	50	8,33	V
5.	Mengoptimalkan kondisi kerja kondusif untuk mengoptimalkan pelayanan kepegawaian dengan satu pintu dengan penerapan e.government;	5	10	20	5	5	10	55	9,16	IV
6.	Mengoptimalkan tingkat kesejahteraan yang memadai untuk peningkatan pelayanan kepegawaian.	10	10	15	10	5	10	65	10,83	III
<b>ISU STRATEGIS (ST):</b>										
1.	<b>Mengoptimalkan eksistensi kelembagaan melalui peraturan gubernur tentang kode etik pegawai untuk pedoman dalam penerapan disiplin pegawai;</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>16,67</b>	<b>I</b>
2.	Mengoptimalkan komitmen pimpinan dalam melaksanakan penilaian uji kompetensi untuk penempatan jabatan melalui assessment ;	5	10	10	10	5	15	55	9,16	V
3.	Mengoptimalkan pengembangan E-goverment dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Manajemen Aparatur	20	10	20	10	5	20	85	14,16	III

	Responsible terpadu untuk meningkatkan keakuratan data base pegawai serta mengoptimalkan Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur;									
4.	Menoptimalkan UPT Penilaian Kompetensi sebagai pusat assessment center untuk pemetaan Pegawai Negari Sipil sesuai dengan kompetensinya;	10	10	15	10	5	10	60	10,00	IV
5.	Mengoptimalkan peranan sumberdaya manusia aparatur untuk penyusunan pemetaan pegawai negeri sipil yang sesuai dengan analisa beban kerja dan analisa jabatan;	10	10	10	10	5	5	50	8,33	VI
7.	Mengoptimalkan tingkat kesejahteraan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui e-government dengan penerapan Sistem Kinerja Pegawai Elektronik	20	10	20	15	5	20	90	15,00	II
<b>ISU STRATEGIS (WO):</b>										
1.	<b>Meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi atau elektronik government dengan penerapan absensi on line serta penerapan pelaksanaan SKP on line;</b>	20	10	20	20	5	15	90	15,00	I
2.	Meningkatkan implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan konsistensi dalam memperbelakukan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;	10	5	5	5	5	10	40	6,66	VI
3.	Mengoptimalkan penyusunan data base kepegawaian dengan penerapan e-government melalui pengembangan Sistem	10	10	15	10	5	15	65	10,83	III

	Aparatur Responsible Terpadu (SMART);									
4.	Mengoptimalkan pemetaan Pegawai Negeri Sipil melalui penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja dengan menjalin kerjasama pihak ketiga;	10	10	10	10	5	10	55	9,16	IV
5.	Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara melalui implementasi reformasi birokrasi serta penerapan e-government dalam pelaksanaan sistem manajemen pelayanan;	20	10	20	10	5	20	85	14,16	II
6.	Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kerja dan kemajuan teknologi .	10	5	10	10	10	5	50	8,33	V
<b>ISU STRATEGIS (WT):</b>										
1.	<b>Mengotimalkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kedisiplinan aparatur dan peningkatan kualitas kinerja aparatur dengan penerapan penilaian kinerja (SKP) on line untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance dan clean governance</i>)</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>95</b>	<b>15,83</b>	<b>I</b>
2.	Mengoptimalkan pelaksanaan implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar dalam pelaksanaan uji kompetensi yang profesional dalam penempatan jabatan;	5	10	10	10	5	15	55	9,16	IV
3.	Meningkatkan sistem manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan E-Government dan pelayanan	20	10	20	20	5	20	90	15,00	II

	satu pintu agar terciptanya Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara yang professional;									
4.	Meningkatkan keakuratan data pegawai dengan Sistem Manajemen Aparatur Responsible Terpadu dalam optimalisasi penerapan sistem manajemen pelayanan aparatur sipil negara;	20	10	20	10	5	20	85	<b>14,16</b>	<b>III</b>
5.	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk sistem manajemen pelayanan Aparatur Sipil Negara berbasis elektronik	10	5	10	10	10	5	50	<b>8,33</b>	<b>V</b>

Sumber Data : Hasil *focus group discussion* Badan Kepegawaian Daerah Riau 2016.

Berdasarkan analisis skala prioritas sebagaimana tersebut diatas diketahui skala prioritas masing-masing kelompok isu strategis, yang akan dijadikan dasar dalam analisis misi, tujuan dan sasaran Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019.



**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN,**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah:

Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur ;

Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen kepegawaian pada misi adalah:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatkan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara ;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Adminitrasi Kepegawaian; dan
5. Meningkatkan kualiatas pelayanan Internal Perangkat Daerah.

**Tabel 4.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Provinsi Riau**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	1. Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya	-	-	-	2%	2%
		2 Peningkatan Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara	2 Presentase Penetapan ASN dalam jabatan	-	-	-	10%	10%
		3 Meningkatnya disiplin Aparatur Sipil Negara	3 Persentase menurunnya angka pelanggaran disiplin	-	-	-	40%	35%
		4 Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian	4 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	B	B

Sumber Data : Hasil focus group discussion Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, 2016



**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Strategi dan Kebijakan**

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manajerial;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui beasiswa tugas belajar ;
3. Meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui uji kompetensi;
4. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara;
5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil Negara melalui pemenuhan kebutuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
6. Menyelenggarakan sistem manajemen kepegawaian yang profesional dan menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi;
7. Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja
8. Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat assesment center berbasis teknologi.

Sedangkan kebijakan yang diambil guna mendukung strategi tersebut adalah:

Strategi 1 : Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manajerial;

- Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan teknis;
- Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan fungsional;
- Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- Melakukan seleksi terbuka bagi jabatan tinggi Provinsi Riau; dan
- Peningkatan wawasan aparatur sipil negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan.

Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar

- Pemberian kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan, bagi PNS yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan melalui tugas belajar mandiri, beasiswa

Strategi 3 : Meningkatkan kualitas penataan aparatur sipil negara melalui seleksi dan penempatan sesuai dengan kompetensi jabatannya

- Melakukan pemetaan jabatan bagi Aparatur Sipil Negara;
- Melakukan pelaksanaan seleksi pendidikan kedinasan;
- Penerapan proses pengadaan aparatur sipil negara secara terbuka, transparan, dan objektivitas melalui kompetensi, kualifikasi untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas;
- Melakukan pelaksanaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- Melakukan pelaksanaan seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- Melakukan penyusunan dokumen penetapan kebutuhan melalui penataan aparatur Sipil Negara yang ideal sesuai kebutuhan dan kompetensi (right sizzing) dengan pemetaan (Mapping);
- Melakukan penyusunan pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola

karier nasional

- Penerapan merit system untuk mutasi dan promosi PNS.

Strategi 4: Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil negara

- Penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi melalui pemantau disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Melakukan tindakan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi; dan
- Penerapan penyampaian tentang laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHK-ASN) bagi seluruh aparatur sipil Negara.

Strategi 5: Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara

- Pemberian fasilitas kepada PNS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku;
- Pemberian perlindungan bagi aparatur sipil negara berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan bantuan hukum;
- Pemberian penambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara berupa tunjangan meliputi tunjangan kinerja dibayarkan dengan penilaian kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku melalui Penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara yang didasarkan sistem prestasi dan karier yang dilakukan oleh tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- Pemberian penghargaan terhadap aparatur sipil negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya;

Strategi 6 : Menyelenggarakan sistem manajemen kepegawaian yang profesional dan Menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi:

- Penerapan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis E-Kepegawaian dan satu pintu
- Meningkatkan profesional pelayanan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian untuk mewujudkan pelayanan prima
- Penerapan, evaluasi dan pembaharuan standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan manajemen aparatur sipil negara untuk meningkatkan mutu pelayanan manajemen aparatur sipil negara;
- Pengembangan Aplikasi Manajemen Kepegawaian berbasis elektronik;
- Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen aparatur sipil negara; dan
- Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, manajemen kepegawaian serta mengevaluasi kegiatan dan program yang dilaksanakan.

Strategi 7 : Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja:

- Penerapan proses kegiatan dan program yang terencana dari tahap proses awal penyusunan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Strategi 8 : Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat assesment center berbasis teknologi yang terakriditas:

- Peningkatan prasarana dan sarana kantor untuk pelayanan manajemen apartur sipil negara melalui sistem informasi berbasis E-Government perkantoran modern dengan sistem, informasi teknologi secara elektronik;

- Membangun UPT Penilaian Kompetensi untuk pengembangan dan pelaksanaan asesmen center provinsi Riau dengan fasilitas dan sarana yang sesuai standar dan terakreditasi untuk pelaksanaan assessment;

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI</b> : Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pematapan aparatur			
<b>MISI</b> : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pematapan Kehidupan Politik			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1 Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	1 Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan fungsional, teknis dan manejerial	1 Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan teknis
			2 Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan fungsional
			3 Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
			4 Peningkatan wawasan aparatur sipil negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan
		2 Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan beasiswa tugas belajar	1 Pemberian kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan, bagi PNS yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan melalui tugas belajar mandiri, beasiswa

	2 Peningkatan Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara	3 Meningkatkan kualitas penataan aparatur sipil negara melalui seleksi dan penempatan sesuai dengan kompetensi jabatannya	1 Melakukan seleksi terbuka bagi jabatan tinggi Provinsi Riau
			2 Melakukan pemetaan jabatan bagi Aparatur Sipil Negara
			3 Melakukan pelaksanaan seleksi pendidikan kedinasan
			4 Penerapan proses pengadaan aparatur sipil negara secara terbuka, transparan, dan objektifitas melalui kompetensi, kualifikasi untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas
			5 Melakukan pelaksanaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
			6 Melakukan pelaksanaan seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
			7 Melakukan pelaksanaan penempatan jabatan baik jabatan tinggi, administrator, pelaksana dan fungsional tertentu sesuai dengan kompetensi jabatannya
			8 Melakukan penyusunan dokumen penetapan kebutuhan melalui penataan aparatur Sipil Negara yang ideal sesuai kebutuhan dan kompetensi (right sizing) dengan pemetaan (Mapping);
			9 Melakukan penyusunan pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional
			10 Penerapan merit system untuk mutasi dan promosi PNS

	3 Meningkatkan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara	4 Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil negara	<p>1 Penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi melalui pemantau disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>2 Melakukan tindakan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi</p> <p>3 Penerapan penyampaian tentang laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHK-ASN) bagi seluruh aparatur sipil negara</p>
	4 Meningkatkan kualitas pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	5 Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara	<p>1 Pemberian fasilitas kepada PNS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>2 Pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku;</p> <p>3 Pemberian perlindungan bagi aparatur sipil negara berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan bantuan hukum</p> <p>4 Pemberian penambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara berupa tunjangan meliputi tunjangan kinerja dibayarkan dengan penilaian kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku melalui Penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara yang didasarkan sistem prestasi dan karier yang dilakukan oleh tim penilai kinerja aparatur sipil Negara</p>

			5	Pemberian penghargaan terhadap aparatur sipil negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya;	
		6	Menyelenggarakan sistem manajemen kepegawaian yang profesional dan Menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi.	1	Penerapan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis E-Kepegawaian dan satu pintu
				2	Meningkatkan profesional pelayanan dalam pengelolaan adminitrasi kepegawaian untuk mewujudkan pelayanan prima
				3	Penerapan, evaluasi dan pembaharuan standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan manajemen aparatur sipil negara untuk meningkatkan mutu pelayanan manajemen aparatur sipil negara
				4	Pengembangan Aplikasi Manajemen Kepegawaian berbasis elektronik
				5	Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen aparatur sipil negara
				6	Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi manajemen kepegawaian, serta mengevaluasi kegiatan dan program yang dilaksanakan

Sumber Data : Hasil focus group discussion Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, 2016



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN**  
**KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Riau periode 2014–2019 adalah:

#### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
10. Penyediaan makan dan minum;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
12. Penyediaan jasa keamanan kantor;
13. Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo);
14. Rapat Koordinasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan se-Provinsi Riau.

#### **B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan peralatan gedung kantor;
2. Pengadaan mebeleur;
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
5. Pembangunan kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya;
6. Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor;
7. Rehabilitasi prasarana dan saran kantor BKD Jl Cut Nyak Dien;
8. Rehabilitasi Prasarana Gedung UPT Balai Diklat Jl Ronggowarsito;
9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

10. Pembangunan Gudang Arsip 2 (dua) lantai BKD Provinsi Riau;
11. Rehabilitasi Gedung I (satu) Kantor BKD Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien;
12. Pembangunan kantor UPT Assessment dan Sarananya;
13. Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan.

#### **C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara**

1. Pemantauan disiplin aparatur sipil negara;
2. Penanganan kasus-kasus kepegawaian;
3. Pelaksanaan sumpah/janji aparatur sipil negara;
4. Pembinaan fisik dan mental aparatur;
5. Training Motivasi Aparatur Sipil Negara;
6. Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau;
7. Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN;
8. Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau;
9. Pengelolaan (LHKPAN) pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau;
10. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
11. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
12. Penyediaan dan pengelolaan atribut PNS Daerah Provinsi Riau.

#### **D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau;
2. Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI;
3. PORDA Korpri;
4. PORNAS Korpri;
5. Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal.

#### **E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja;
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
5. Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD;
6. Penyusunan Revisi Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD;
7. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);

8. Penyusunan Penetapan Kinerja (Penja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
9. Pelaporan barang milik daerah.

#### **F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Diklat fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
2. Diklat analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
3. Diklat analisa jabatan dan beban kerja;
4. Diklat Teknis Komputer;
5. Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah;
6. Diklat Bahasa Inggris (*TOEFL*);
7. Diklat Teknis Administrasi Kearsipan;
8. Diklat teknis administrasi kepegawaian;
9. Diklat teknis penyusunan standar operasional prosedur;
10. Diklat teknis penyusunan tata naskah dinas;
11. Diklat luar negeri (Kerja sama dengan Pemerintah Singapore);
12. Diklat teknis perumusan standar kompetensi;
13. Diklat penata usahaan keuangan daerah;
14. Diklat bendahara keuangan daerah;
15. Diklat pengelolaan aset daerah;
16. Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan *good governance*;
17. Diklat Pengembangan *e-government*;
18. Diklat perencanaan tingkat dasar;
19. Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
20. Diklat pengembangan potensi akademik;
21. Diklat Membangun Program Inofatif;
22. Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing;
23. Diklat Implementasi Knowledge Management;
24. Diklat Membangun Kemitraan;
25. Diklat Membangun Keunggulan Kompetitif Daerah;
26. Diklat Kepemimpinan Global;
27. Diklat Entrepreneurial Government;
28. Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi;
29. Diklat Tenaga Pengola Teknis;

30. Diklat Creative Problem Solving;
31. Diklat Penyusunan Karya Tulis ilmiah;
32. Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara;
33. Diklat *Training of Trainers* (TOT) widyaiswara;
34. Diklat Substansi Bagi Widyaiswara Pola Baru (TOF);
35. Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
36. Diklat *Training of Fasilitator* (TOF);
37. Diklat *Training Officer Course* (TOC);
38. Diklat *Management of Training* (MOT);
39. Diklat TOC Pola Baru bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD;
40. Diklat MOT Pola Baru bagi Penyelenggara Diklat Dilingkungan BKD;
41. Diklat Substansi Materi Penguasaan Diri;
42. Diklat Substansi Materi Diagnosa Perubahan;
43. Diklat Substansi Materi Tim Efektif;
44. Diklat Substansi Materi Proyek Perubahan;
45. Diklat Substansi Materi Inovasi;
46. Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau;
47. Diklat Teknis ke Widyaiswaraan berjenjang;
48. Diklat Kepemimpinan Situasional;
49. Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Perencana Aparatur;
50. Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, analisis kepegawaian;
51. Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Peneliti;
52. Orasi Ilmiah Widyaiswara;
53. Seleksi asesor Provinsi Riau;
54. Pelatihan dan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau.

#### **G. Program Pendidikan Kedinasan Aparatur Sipil Negara**

1. Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas;
2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I);
3. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II);
4. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III);
5. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV);
6. Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4);

7. Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
8. Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
9. Penunjang pendidikan ikatan dinas.

#### **H. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur**

1. Pengelolaan pensiun PNS;
2. Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti;
3. Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun;
4. Pemanfaatan penggunaan kartu ASKES bagi PNS Provinsi Riau;
5. Penyelenggaraan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau.

#### **I. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

1. Bimbingan teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;
2. Bimbingan teknis penyusunan formasi pengadaan aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) Pemerintah Provinsi Riau;
3. Bimbingan teknis perencanaan penganggaran responsif gender;
4. Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimbingan Teknis Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
5. Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintahan Provinsi Riau;
7. Bimtek Manajemen Kontruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau;
8. Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau;
9. Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011;
10. Bimtek Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pegawai;
11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD;
12. Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training
13. Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau;
14. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010;
15. Sosialisasi Perkalan No.10, 11, 12, dan 13 Tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk.III dan IV pola baru;
16. Sosialisasi Penatausahaan Jabatan Fungsional se-Provinsi Riau;

17. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau;
18. Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara;
19. Workshop Pelaksanaan Cuti PNS se Provinsi Riau;
20. Workshop Kegiatan bagi PPTK;
21. Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon III;
22. Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon IV;
23. Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
24. Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur;
25. Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat;
26. Penyusunan dan Pembinaan karier Aparatur Sipil Negara;
27. Seleksi Penerimaan CPNS;
28. Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
29. Seleksi Penerimaan IPDN;
30. Assesment Center Provinsi Riau;
31. Pengelolaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
32. Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan;
33. Monitoring IPDN;
34. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat;
35. Monitoring dan evaluasi pasca diklat;
36. Monitoring dan evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara;
37. Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II;
38. Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota se Provinsi Riau;
39. Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II;
40. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011;
41. Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau;
42. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau;
43. Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau;

44. Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur se-Provinsi Riau;
45. Pengembangan e-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau;
46. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
47. Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik (e-document);
48. Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah kepegawaian;
49. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik;
50. Satya Lencana Karya Satya;
51. Pengadaan Modul Pembelajaran;
52. Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau;
53. Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau;
54. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau;
55. Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi;
56. Penyusunan Materi/Alat Test;
57. Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau;
58. Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI;
59. Halal Bi Halal dan Pelepasan Jemaah Haji anggota KORPRI;
60. Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan KORPRI Kabupaten/Kota.

#### **J. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara**

1. Pengelolaan Humas BKD;
2. Rapat-rapat tim Baperjakat Provinsi Riau;
3. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural/Fungsional di lingkungan Pemda Provinsi Riau;
4. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau;
5. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
6. Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau;
7. Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan

- Pratama dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau;
8. Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau;
  9. Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional widiyaiswara Provinsi Riau;
  10. Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibawah binaan BKD Provinsi Riau;
  11. Pengelolaan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
  12. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemda Provinsi Riau;
  13. Pengelolaan administrasi izin belajar;
  14. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
  15. Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
  16. Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau;
  17. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS
  18. Pengelolaan data kepegawaian;
  19. Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
  20. Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau;
  21. Pengelolaan Website Badan Kepegawaian Daerah;
  22. Penyebarluasan informasi pembinaan dan pengembangan aparatur melalui seleksi penerimaan CPNS melalui media Online;
  23. Pembinaan dan pengawasan pertambangan secara visual melalui media TV Online;
  24. Pemberitaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur melalui media cetak;
  25. Penyusunan SOP dan SPP Badan Kepegawaian dan Diklat;
  26. Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik.

#### **K. Program Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama KORPRI**

1. Pemantapan Usaha Bagi Anggota KORPRI;
2. KORPRI Peduli Pada Anggota KORPRI dan Masyarakat.

**L. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
2. Konsultasi dan Bantuan Hukum.

**M. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

1. Pemantapan wawasan kebangsaan dan semangat pengabdian.

Secara sederhana rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, capaian awal dan capaian akhir dapat dilihat tabel 6.1 dan 6.2

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2015 - 2019**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target														KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		Lokasi						
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Anggaran									
					Tahun 2014		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran											
					Target	Persen											Target	Persen	Target	Persen		Target	Persen	Target	Persen	Target	Persen
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Urusan)	Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100	Persen	100	Persen	-	100	Persen	6.218.625.100	100	Persen	2.069.820.000	100	Persen	494.650.000	100	Persen	494.650.000	100	Persen	17.180.725.800			
			1	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	16	Orang											10	Orang	100.000.000	26	Orang	302.660.000	Luar Daerah			
			2	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat Teknis bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau pegawai Pemerintah Provinsi Riau													10	Orang	100.000.000	10	Orang	100.000.000	Luar Daerah			
			3	Diklat Teknis ke Widyaiswaraan berjenjang	Jumlah Widyaiswara yang terfasilitasi untuk mengikuti Diklat berjenjang ke-Widyaiswaraan				30	Orang	282.013.050	4	Orang	54.357.006										34	Orang	336.370.056	Luar Daerah
			4	Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Perencana Aparatur	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Perencana Aparatur				20	Orang	727.280.000	20	Orang	852.528.000										40	Orang	1.579.808.000	Luar Daerah
			5	Pelatihan dan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas				15	Orang	452.250.000	15	Orang	169.204.400	25	Orang	201.500.100	10	Orang	100.000.000	65	Orang	922.954.500	Luar Daerah/Dalam Daerah			
			6	Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Training Motivasi Aparatur Sipil Negara													10	Orang	150.000.000	10	Orang	150.000.000	Pekanbaru			
			7	PORNAS Korpri	Jumlah peserta PORNAS KORPRI Provinsi Riau							50	Orang	296.863.428									50	Orang	296.863.428	Provinsi Riau dan Luar Daerah	
			8	PORDA Kopri	Jumlah peserta PORDA KOPRI							400	Orang	100.000.000									400	Orang	100.000.000	Provinsi Riau	
			9	Pematapan wawasan kebangsaan dan semangat pengabdian	Jumlah Anggota KOPRI yang dilakukan pematapan wawasan kebangsaan dan pengabdian							300	Orang	70.000.000									300	Orang	70.000.000	Provinsi Riau	
			10	Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	Jumlah dewan pengurus KORPRI yang mengikuti koordinasi dan konsolidasi							143	Orang	150.000.000	143	Orang	153.735.800						286	Orang	303.735.800	Pekanbaru	
			11	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI							1.500	Orang	80.000.000	1.500	Orang	61.357.000						3.000	kegiatan	141.357.000	Pekanbaru	
			12	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal	Jumlah Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang dilaksanakan							10	Kali	50.000.000	10	Kali	78.057.100	10	Kali	44.650.000	30	Kali	172.707.100	Pekanbaru			
			13	Seleksi asesor Provinsi Riau	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang lulus Seleksi asesor Provinsi Riau				15	Orang	315.881.000	30	Orang	246.867.166									45	Orang	562.748.166	Luar Daerah dan Pekanbaru	
			14	Pembinaan fisik dan mental aparatur	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan mental	168	Orang																168	Orang	124.076.000	Pekanbaru	
			15	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	1	Orang																1	Orang	53.702.250	Luar Daerah	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA			Lokasi		
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Anggaran		Target	
					Tahun 2014	Target	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
					7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
1	2	3	4	5	6	Orang												6	Orang	307.661.000	Luar Daerah
			16 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	6	Orang												6	Orang	307.661.000	Luar Daerah
			17 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM III)	40	Orang												40	Orang	726.369.000	Pekanbaru
			18 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	30	Orang												30	Orang	607.870.000	Pekanbaru
			19 Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. III	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan CPNS Gol III 24 hari	40	Orang												40	Orang	236.562.000	Pekanbaru
			20 Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. II	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan CPNS Gol II	80	Orang												80	Orang	286.262.000	Pekanbaru
			21 Assesment Center Provinsi Riau	Terlaksananya Lanjutan Pengembangan Assesment SDM Provinsi Riau	10	Orang												10	Orang	2.094.951.950	Pekanbaru
			22 Koordinasi dan Sinkronisasi Sasaran Kinerja Pegawai Provinsi Riau	Jumlah SKP PNS yang diverivikasi	7.092	Orang												7.092	Orang	359.764.250	Kabupaten Kota
			23 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Jumlah SKP PNS yang diverivikasi	7.092	Orang												7.092	Orang	208.126.500	Kabupaten Kota
			24 Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau	40	Orang												40	Orang	211.096.800	Pekanbaru
			25 Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintahan Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintahan Provinsi Riau	100	Orang												100	Orang	340.350.350	Pekanbaru
			26 Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga	85	Orang												85	Orang	285.600.000	Pekanbaru
			27 Penyebarluasan informasi pembinaan dan pengembangan aparatur melalui seleksi penerimaan CPNS melalui media online	Jumlah paket kegiatan informasi pembinaan dan pengembangan aparatur melalui seleksi penerimaan CPNS melalui media online	1	Paket												1	Paket	146.000.000	Pekanbaru
			28 Pembinaan dan pengawasan pertambangan secara visual melalui media TV Online	Jumlah kegiatan sosialisasi dan publikasi kegiatan pembinaan dan pengembangan aparatur secara visual melalui media TV on line	1	Kegiatan												1	kegiatan	198.000.000	Pekanbaru
			29 Pemberitaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur melalui media cetak	Rentan waktu pemberitaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur melalui media cetak	1	Tahun												1	Tahun	100.000.000	Pekanbaru
			30 Penyediaan dan pengelolaan atribut PNS Daerah Provinsi Riau	Jumlah atribut PNS Daerah Provinsi Riau yang disediakan dan dikelola	8.200	Orang												8.200	Orang	1.413.928.600	Pekanbaru
			31 Diklat Luar Negeri	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Luar Negeri (kerjasama dengan pemerintah)					22	Orang	329.816.000							22	Orang	329.816.000	Luar Negeri
			32 Diklat Membangun Program Inofatif	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Membangun Program Inofatif					30	Orang	100.500.000							30	Orang	100.500.000	Pekanbaru
			33 Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing					30	Orang	100.500.000							30	Orang	100.500.000	Pekanbaru
			34 Diklat Implementasi Knowledge Management	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Implementasi Knowledge Management					30	Orang	100.500.000							30	Orang	100.500.000	Pekanbaru
			35 Diklat Membangun Kemitraan	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Membangun Kemitraan					30	Orang	100.500.000							30	Orang	100.500.000	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA			Lokasi						
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target		Anggaran	Target				
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran										
					7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
			36	Diklat Membangun Keunggulan Kompetitif Daerah	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Membangun Kompetitif Daerah				30	Orang	100.500.000							30	Orang	100.500.000	Pekanbaru					
			37	Diklat Kepemimpinan Global	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Global				30	Orang	100.500.000							30	Orang	100.500.000	Pekanbaru					
			38	Diklat Entrepreneurial Government	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Entrepreneurial Government				30	Orang	100.500.000							30	Orang	100.500.000	Pekanbaru					
			39	Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi				30	Orang	100.500.000							30	Orang	100.500.000	Pekanbaru					
			40	Diklat Tenaga Pengelola Teknis	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Tenaga Pengelola Teknis				30	Orang	100.500.000							30	Orang	100.500.000	Pekanbaru					
			41	Diklat Creative Problem Solving	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Creative Problem Solving				30	Orang	100.500.000							30	Orang	100.500.000	Pekanbaru					
			42	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah				30	Orang	100.500.000							30	Orang	100.500.000	Pekanbaru					
			43	Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan teknis fungsional Widyaiswara				30	Orang	282.013.050							30	Orang	282.013.050	Luar Daerah					
			44	Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, analisis kepegawaian	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, analisis kepegawaian				20	Orang	603.000.000							20	Orang	603.000.000	Luar Daerah dan Pekanbaru					
			45	Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Peneliti	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Peneliti				30	Orang	1.813.722.000							30	Orang	1.813.722.000	Luar Daerah					
			46	Orasi Ilmiah Widyaiswara	Jumlah Orasi Ilmiah Widyaiswara yang mengikuti Orasi Ilmiah Widyaiswara				5	Orang	307.150.000							5	Orang	307.150.000	Pekanbaru					
			<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>		<b>Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan tugas belajar</b>	<b>240</b>	<b>Orang</b>	<b>391</b>	<b>Orang</b>	<b>8.123.869.000</b>	<b>401</b>	<b>Orang</b>	<b>10.939.856.070</b>	<b>50</b>	<b>Orang</b>	<b>4.684.487.350</b>	<b>50</b>	<b>Orang</b>	<b>14.063.110.000</b>	<b>50</b>	<b>Orang</b>	<b>14.063.110.000</b>	<b>50</b>	<b>Orang</b>	<b>54.848.010.670</b>	
			1	Pemberian beasiswa tugas belajar	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar			29	Orang	3.605.923.000	25	Orang	4.000.000.000	34	Orang	3.476.840.250	44	Orang	4.741.680.400	44	Orang	7.265.250.446	176	Orang	23.089.694.096	Luar Daerah
			2	Pemberian beasiswa tugas belajar luar negeri	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar Luar Negeri											6	Orang	8.000.000.000	6	Orang	5.000.000.000	12	Orang	13.000.000.000	Luar Negeri	
			3	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)			1	Orang	59.072.000	1	Orang	128.209.000	2	Orang	100.036.400	1	Orang	71.170.100	1	Orang	56.670.020	6	Orang	415.157.520	Luar Daerah
			4	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)			8	Orang	735.000.000	15	Orang	1.313.500.000	4	Orang	250.000.000	6	Orang	670.985.900	6	Orang	815.589.534	39	Orang	3.785.075.434	Luar Daerah
			5	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti seleksi diklat kepemimpinan (PIM2,3,4)			100	Orang	125.000.000	100	Orang	167.903.700	100	Orang	207.610.700							300	Orang	500.514.400	Pekanbaru
			6	Penunjang pendidikan ikatan dinas	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pendidikan Kedinasan						17	Orang	633.000.000	20	Orang	650.000.000	20	Orang	579.273.600	227	Orang	925.600.000	284	Orang	2.787.873.600	Pekanbaru
			7	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat	Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat 12 Kabupaten kota	1	Dokumen															1	Dokumen	96.537.250	Kabupaten Kota	
			8	Monitoring dan evaluasi pasca diklat	Hasil Monitoring dan evaluasi pasca diklat	1	Dokumen															1	Dokumen	76.646.000	Pekanbaru	
			9	Monitoring IPDN	Hasil Monitoring IPDN di 8 regional kampus IPDN	1	Dokumen															1	Dokumen	242.828.000	Luar Daerah	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	DATA CAPAIAN KONDISI AWAL												Target						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Anggaran	Target	Anggaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	12

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target													KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA			Lokasi					
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019						
					Tahun 2014		Target	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target		Anggaran				
					Target	Anggaran																	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			4	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Penghargaan Berprestasi	36	Orang			18	Orang	874.676.625	18	Orang	885.000.000			23	Orang	1.113.668.732	95	Orang	3.741.787.657	Luar Negeri		
			5	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Tinggi yang terseleksi melalui uji kompetensi								67	Orang	1.500.000.000			34	Orang	986.000.000	101	Orang	2.486.000.000	Pekanbaru		
			6	Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah Dokumen Peta Jabatan yang terselesaikan ditetapkan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	1	Dokumen			1	Dokumen	541.200.000	1	Dokumen	580.000.000						3	Dokumen	1.643.128.600	Pekanbaru		
			7	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau yang tersusun								250	Jabatan	250.000.000	1	Dokumen	164.380.900					251	Jabatan	414.380.900	Pekanbaru
			8	Penyusunan Standar Kompetensi Provinsi Riau	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Provinsi Riau yang tersusun													1	Dokumen	250.000.000	1	Jabatan	250.000.000	Pekanbaru		
			9	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK Pegawai BKD	Jumlah Pegawai Negeri Sipil BKD yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan BinteK			30	Orang	431.200.000	32	Orang	531.200.000	10	Orang	150.000.000	7	Orang	100.000.000	30	Orang	218.587.500	109	Orang	1.430.987.500	Luar Daerah
			10	Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan	Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 12 Kabupaten Kota	1	Dokumen				1	Dokumen	169.378.077	1	Dokumen	200.000.000	1	Dokumen	166.787.500	1	Dokumen	200.000.000	5	Dokumen	1.003.572.377	Kabupaten Kota
			11	Pengembangan e-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/titir/perangkat untuk e-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	6	Aplikasi	4	Aplikasi	2.154.400.000	4	Aplikasi	1.407.000.000	1	Aplikasi	707.017.500	1	Aplikasi	4.221.199.958	5	Aplikasi	300.000.000	21	Aplikasi	10.289.617.458	Pekanbaru
			12	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah						1	Aplikasi	97.486.063									1	Aplikasi	97.486.063	Pekanbaru	
			13	Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi Riau	Jumlah Aplikasi Psikometri dan Data Base Assessment ASN Provinsi Riau yang dibuat								1	Aplikasi	350.000.000			1	Aplikasi	150.000.000	2	Aplikasi	500.000.000	Pekanbaru		
			14	Penyusunan Materi Alat Test	Jumlah Materi dan Alat Test yang disusun								10	Materi	175.000.000			10	Materi	175.000.000	20	Meteri	350.000.000	Pekanbaru		
			15	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Jumlah JPT yang di monitoring dan dilaksanakan di 12 Kabupaten Kota								360	Orang	150.000.000	360	Orang	88.674.500	360	Orang	150.000.000	1.080	Orang	388.674.500	Kabupaten Kota	
			16	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya	325	Orang				350	Orang	436.200.765	500	Orang	227.650.000	500	Orang	113.044.800	500	Orang	150.000.000	2.175	Orang	1.349.020.965	Pekanbaru
			17	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspem PNS se Provinsi Riau	Hasil monitoring PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN	1	Dokumen				1	Dokumen	80.400.000	1	Dokumen	97.235.000	1	Dokumen	69.826.300	1	Dokumen	125.200.000	5	Dokumen	534.786.100	Kabupaten Kota
			18	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	Hasil monitoring dan evaluasi jabatan fungsional PNS Provinsi Riau			1	Dokumen	200.000.000	1	Dokumen	200.000.000	1	Dokumen	150.000.000	1	Dokumen	92.674.000	1	Dokumen	150.000.000	5	Dokumen	792.674.000	Kabupaten Kota
			19	Monitoring dan Pendampingan Penyusunan Kenaikan Pangkat PNS di	Hasil monitoring dan pendampingan Kenaikan Pangkat Kabupaten/kota											1	Dokumen	179.404.000	1	Dokumen	300.000.000	2	Dokumen	479.404.000	Kabupaten Kota	
			20	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Hasil data SKP Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota yang di monitoring			1	Dokumen	228.939.000	1	Dokumen	280.829.300	1	Dokumen	150.000.000	1	Dokumen	114.912.600	1	Dokumen	150.000.000	5	Dokumen	924.680.900	Kabupaten Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target													KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		Lokasi								
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL			Tahun 2015			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target		Anggaran							
					Tahun 2014		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran												
					Target	Anggaran											Target	Anggaran	Target		Anggaran	Target	Anggaran					
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			21	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Hasil koordinasi dan sinkronisasi SIMPEG yang dikembangkan atau disinkronisasi di 12 Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	173.243.600	1	Dokumen	174.109.818	1	Dokumen	150.000.000					1	Dokumen	150.000.000	5	Dokumen	1.007.147.668	Kabupaten Kota	
			22	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian ( e-document)	Jumlah dokumen yang terpelihara	1.500	dokumen	1.500	dokumen	200.000.000	1.500	dokumen	201.000.000	1.500	Dokumen	150.000.000	1.500	Dokumen	224.942.700	7.000	Dokumen	236.156.000	14.500	dokumen	1.219.575.550	Pekanbaru		
			23	Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se- Provinsi Riau	Jumlah Dokumen hasil koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se- Provinsi Riau						1	Dokumen	251.250.000	1	Dokumen	150.000.000									2	Dokumen	401.250.000	Pekanbaru
			24	Monitoring IPDN	Hasil Monitoring IPDN di 8 regional kampus IPDN			1	Dokumen	160.000.000	1	Dokumen	242.564.000	1	Dokumen	250.000.000		1	Dokumen	213.960.900	1	Dokumen	242.564.000	5	Dokumen	1.109.088.900	Luar Daerah	
			25	Perombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Perombaan Dalam Rangka HUT KORPRI									200	Orang	250.000.000		200	Orang	104.527.300	200	Orang	182.407.500	600	Orang	536.934.800	Pekanbaru	
			26	MTQ Nasional KORPRI	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dikirim mengikuti MTQ korpri provinsi dan MTQ nasional korpri													130	Orang	702.789.300				130	Orang	702.789.300	Luar Daerah	
			27	Pembinaan dan pengawasan kelembagaan KOPRI Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaannya									11	Kabupaten /kota	100.000.000								11	Kabupaten /kota	100.000.000	Kabupaten Kota	
			28	Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Peneliti	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Peneliti			35	Orang	1.200.000.000								20	Orang	645.699.800				55	Orang	1.845.699.800	Luar Daerah	
			29	Halal Bihalal dan Pelepasan Jemaah Haji	Jumlah PNS yang mengikuti halal bihalal dan haji									200	Orang	75.000.000								200	Orang	75.000.000	Pekanbaru	
			30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Data Kepegawaian	Hasil Data Kepegawaian PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang dikelola	4	Dokumen																	4	Dokumen	433.978.800	Kabupaten Kota	
			31	Koordinasi dan Sinkronisasi SAPK Provinsi Riau	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi SAPK Provinsi Riau	1	Dokumen																	1	Dokumen	225.000.000	Kabupaten Kota	
			32	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Jumlah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	1	Aplikasi																	1	Aplikasi	552.202.750	Pekanbaru	
			33	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	300	Orang																	300	Orang	195.524.700	Pekanbaru	
			34	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian yang dikelola	4	Dokumen	4	Dokumen	295.277.000														8	Dokumen	460.760.800	Pekanbaru	
			35	Pengelolaan Website Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah Informasi Berita Web Site Badan Kepegawaian Daerah	75	Berita	75	Berita	102.190.000														150	Berita	308.090.000	Pekanbaru	
			36	Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Hasil Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1	Dokumen																	1	Dokumen	102.950.100	Pekanbaru	
			37	Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	Jumlah Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang terkelola	500	Orang																	500	Orang	228.552.000	Pekanbaru	
			38	Pengelolaan administrasi izin belajar	Jumlah administrasi izin belajar yang diselesaikan	1	Dokumen																	1	Dokumen	43.953.050	Pekanbaru	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	DATA CAPAIAN KONDISI AWAL												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA			Lokasi			
					Target												Target	Anggaran	Target		Anggaran		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019								
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			39	Pengelolaan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah berkas Pengelolaan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	200	Berkas													200	Berkas	99.600.000	Pekanbaru
			40	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural/Fungsional di lingkungan Pemda Provinsi Riau	Hasil Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural/Fungsional di lingkungan Pemda Provinsi Riau	1	Dokumen													1	Dokumen	189.075.750	Pekanbaru
			41	Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau	Hasil Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau	1	Dokumen													1	Dokumen	258.708.000	Pekanbaru dan Kabupaten
			42	Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional widyaiswara Provinsi Riau yang terkelola	Jumlah penetapan angka kredit jabatan fungsional widyaiswara Provinsi Riau yang terkelola	10	Orang/dupak/pak wi													10	Orang/dupak/pak wi	130.445.000	Pekanbaru
			43	Pengelolaan Humas BKD	Rentang waktu pengelolaan humas BKD			12	Bulan	220.000.000										12	Bulan	220.000.000	Pekanbaru
			44	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	3.000	Orang													3.000	Orang	535.048.000	Pekanbaru
			45	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II	Hasil Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II	1	Dokumen	1	Dokumen	200.000.000										2	Dokumen	384.438.500	Kabupaten Kota
			46	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota se Provinsi Riau	Hasil Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota se Provinsi Riau			1	Dokumen	180.298.377										1	Dokumen	180.298.377	Kabupaten Kota
			47	Monitoring dan evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara	Hasil Monitoring dan evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara			1	Dokumen	166.810.600	1	Dokumen	113.300.000							2	Dokumen	280.110.600	Kabupaten Kota
			48	Pemanfaatan penggunaan kartu ASKES bagi PNS Provinsi Riau	Hasil data pemanfaatan penggunaan kartu ASKES bagi PNS Provinsi Riau dengan maksimal	1	Dokumen													1	Dokumen	296.563.300	Pekanbaru
			49	Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	114	Orang	70	Orang	168.503.200	90	Orang	90.450.000							274	Orang	567.449.950	Pekanbaru
			50	Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	120	Orang	120	Orang	274.540.900	120	Orang	90.902.450							360	Orang	584.371.950	Pekanbaru
			51	Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	30	Orang				60	Orang	150.000.000							90	Orang	286.251.800	Pekanbaru
			52	Bimtek Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pegawai	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Bimtek Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pegawai	40	Orang				30	Orang	45.225.000							70	Orang	225.672.000	Pekanbaru
			53	Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau	40	Orang				30	Orang	45.225.000							70	Orang	212.711.800	Pekanbaru
			54	Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintahan Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintahan Provinsi Riau			75	Orang	301.100.350	90	Orang	90.450.000							165	Orang	391.550.350	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA			Lokasi		
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL			Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target		Anggaran	Anggaran
					Tahun 2014			Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
					Target	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target		Anggaran	Target
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			55	Bimtek Manajemen Kontruksi bagi aparaturn Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Bimtek Manajemen Kontruksi bagi aparaturn Pemerintah Provinsi Riau		50	Orang	250.000.000	120	Orang	90.450.000						170	Orang	340.450.000	Pekanbaru
			56	Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011		100	Orang	180.000.000									100	Orang	180.000.000	Pekanbaru
			57	Sosialisasi Penatausahaan Jabatan Fungsional se- Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Sosialisasi Penatausahaan Jabatan Fungsional se- Provinsi Riau	65	Orang											65	Orang	101.413.600	Pekanbaru
			58	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010		70	Orang	166.700.000									70	Orang	166.700.000	Pekanbaru
			59	Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau		100	Orang	200.000.000	60	Orang	90.450.000						160	Orang	290.450.000	Pekanbaru
			60	Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara		200	Orang	250.000.000	60	Orang	130.000.000						260	Orang	380.000.000	Pekanbaru
			61	Workshop Kegiatan bagi PPTK	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Workshop Kegiatan bagi PPTK		75	Orang	145.844.500	60	Orang	90.450.000						135	Orang	236.294.500	Pekanbaru
			62	Workshop Pelaksanaan Cuti PNS se Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Workshop Pelaksanaan Cuti PNS se Provinsi Riau	114	Orang											114	Orang	243.453.650	Pekanbaru
			63	Pengadaan Calon PNS	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti kegiatan CPNS sesuai dengan formasi dan peraturan yang berlaku	168	Orang											168	Orang	2.561.054.750	Pekanbaru
			64	Seleksi Calon PNS	Jumlah CPNS yang terseleksi sesuai dengan formasi dan peraturan yang berlaku	168	Orang											168	Orang	943.810.750	Pekanbaru
			65	Seleksi Penerimaan IPDN	Jumlah praja yang terseleksi untuk Penerimaan IPDN	100	Orang	100	Orang	324.762.000	100	Orang	753.750.000					300	Orang	1.357.479.250	Pekanbaru
			66	Pelaksanaan Grand Design SDM Aparatur	Hasil Grand Design SDM Aparatur	1	Dokumen											1	Dokumen	520.890.000	Pekanbaru
			67	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang disusun untuk diusulkan	186	Formasi											186	Formasi	338.900.000	Pekanbaru
			68	Penyusunan SOP dan SPP Badan Kepegawaian dan Diklat	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang tersusun dan dikelola	214	Dokumen											214	Dokumen	150.000.000	Pekanbaru
			69	Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Pokja KPK	50	Orang											50	Orang	203.948.000	Pekanbaru
			70	Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau	25	Orang	40	Orang	376.704.000								65	Orang	704.419.000	Luar daerah
			71	Peningkatan sumber daya aparaturn dengan Emotional Spiritual Quotient Training	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Peningkatan sumber daya aparaturn dengan Emotional Spiritual Quotient Training	100	Orang	100	Orang	212.828.200	33	Orang	90.450.000					233	Orang	480.635.100	Pekanbaru
			72	Rapat-rapat tim Baperjakat Provinsi Riau	Frekwensi Rapat-rapat tim Baperjakat Provinsi Riau	60	Kali Rapat											60	Kali Rapat	123.441.250	Pekanbaru
			73	Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS Provinsi Riau yang menerima Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	28	Orang											28	Orang	3.744.817.500	Luar Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA			Lokasi			
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Anggaran		Anggaran		
					Tahun 2014	Target	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran						
					7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			74	Pembentukan karakter Tim Work Sumber Daya Aparatur BKD Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikut Kerjasama dan Kebersamaan Antara Pegawai BKD Provinsi Riau	135	Orang												135	Orang	287.446.900	Pekanbaru
			75	Diklat Luar Negeri ( Kerjasama dengan Pemerintah Singapore ) I	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikutDiklat Luar Negeri (kerjasama dengan pemerintah Singapore ) I	17	Orang												17	Orang	300.000.000	Luar negeri
			76	Diklat Analisis kebutuhan diklat	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikutDiklat analisis kebutuhan diklat	50	Orang												50	Orang	184.916.550	Pekanbaru
			77	Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikut Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	40	Orang												40	Orang	255.854.000	Pekanbaru
			78	Diklat Kepemimpinan Situasional	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikut Diklat Kepemimpinan Situasional	80	Orang												80	Orang	196.716.500	Pekanbaru
			79	Diklat Teknis Komputer	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikut Diklat Teknis Komputer	20	Orang												20	Orang	75.407.000	Pekanbaru
			80	Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikut Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	30	Orang												30	Orang	61.035.000	Pekanbaru
			81	Diklat Teknis Bahasa Inggris (Toefl)	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikut Diklat Teknis Bahasa Inggris (Toefl)	20	Orang												20	Orang	83.410.000	Pekanbaru
			82	Diklat Teknis Administrasi Kearsipan	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikut Administrasi Kearsipan	30	Orang												30	Orang	67.335.000	Pekanbaru
			83	Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikut Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas	30	Orang												30	Orang	67.335.000	Pekanbaru
			84	Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikut Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	30	Orang												30	Orang	71.535.000	Pekanbaru
			85	Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikutDiklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	30	Orang												30	Orang	52.935.000	Pekanbaru
			86	Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Perencana Aparatur	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Perencana Aparatur			20	Orang	1.200.000.000									20	Orang	1.200.000.000	Luar Daerah
			87	Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, analisis kepegawaian	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, analisis kepegawaian			20	Orang	600.000.000									20	Orang	600.000.000	Luar Daerah
			88	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikut Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD	135	Orang	60	Orang	435.000.000	60	Orang	437.175.000						255	Orang	1.497.117.350	Luar Daerah
			89	Rakor Widyaiswara	Hasil Rakor Widyaiswara	1	Dokumen	1	Dokumen	221.093.400	1	Dokumen	162.870.000						3	Dokumen	584.957.400	Pekanbaru
			90	Assesment Center Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikut Assesment Center Provinsi Riau			189	Orang	1.756.000.000	2.273	Orang	4.508.973.400						2.462	Orang	6.264.973.400	Pekanbaru
			91	Seleksi dan Pemetaan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang terseleksi dan ditetapkan			350	Orang	1.478.835.000									350	Orang	1.478.835.000	Pekanbaru
			92	Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat	Hasil penyusunan analisis kebutuhan diklat			1	Dokumen	250.000.000	1	Dokumen	251.200.000						2	Dokumen	501.200.000	Pekanbaru
			93	Penyusunan dan Pembinaan karier Aparatur Sipil Negara	Hasil Penyusunan dan Pembinaan karier Aparatur Sipil Negara						1	Dokumen	791.200.000						1	Dokumen	791.200.000	Pekanbaru
			94	Penyusunan Profil BKP2D Provinsi Riau	Hasil Penyusunan Profil BKP2D Provinsi Riau						1	dokumen/vi deo	100.000.000						1	dokumen/vi deo	100.000.000	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA			Lokasi						
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target							
					Target		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target		Anggaran					
					7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			95	Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Training Motivasi Aparatur Sipil Negara			100	Orang	300.000.000										100	Orang	300.000.000	Luar Daerah			
			96	Pembinaan fisik dan mental aparatur	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan mental			168	Orang	161.298.800										168	Orang	161.298.800	Pekanbaru			
			97	Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon III	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon III			50	Orang	255.782.500										50	Orang	255.782.500	Pekanbaru			
			98	Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon IV	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti Pembentukan Karakter Kepemimpinan bagi Eselon IV			75	Orang	315.284.500										75	Orang	315.284.500	Pekanbaru			
			99	Orasi Ilmiah Widyaiswara	Jumlah Widyaiswara yang mengikuti Orasi Ilmiah Widyaiswara			3	Orang	200.994.000										3	Orang	200.994.000	Pekanbaru			
			100	Pengadaan Modul Pembelajaran	Hasil pengadaan modul pembelajaran						1	Dokumen	150.750.000							1	Dokumen	150.750.000	Pekanbaru			
			101	Akreditasi UPT Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau	Hasil Akreditasi UPT Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau						4	Sertifikat Akreditasi UPT	250.000.000							4	Sertifikat Akreditasi UPT	250.000.000	Pekanbaru			
Meningkatnya disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara	Persentase menurunnya angka pelanggaran disiplin	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jumlah penataan pengembangan manajemen ASN yang profesional		100	Persen	100	Persen	-	100	Persen	-	100	Persen	-	100	Persen	366.825.000	100	Persen	1.490.175.000					
			1	Penanganan kasus-kasus kepegawaian	Jumlah penanganan kasus-kasus kepegawaian yang terselesaikan	60	Kasus							60	Kasus	185.000.000				60	Kasus	185.925.000	Pekanbaru dan Kabupaten			
			2	Pemantauan disiplin PNS	Hasil pemantauan disiplin PNS									1	Dokumen	300.000.000				1	Dokumen	180.900.000	Kabupaten Kota			
			3	Konsultasi dan Bantuan Hukum	Jumlah PNS yang diberikan konsultasi dan bantuan hukum									50	Orang	400.000.000				50	Orang	400.000.000	Kabupaten Kota			
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase Pelayanan ASN dan Proses Manajemen ASN yang terselesaikan		80	Persen	82	Persen	4.075.616.200	84	Persen	3.414.461.627	75	Persen	3.637.650.000	80	Persen	2.189.580.000	85	Persen	1.861.140.000	85	Persen	15.178.447.827		
			1	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah surat keputusan penetapan angka kredit jabatan fungsional Provinsi Riau yang terkelola									100	SK	250.000.000	100	SK	63.974.100	100	SK	75.000.000	300	SK	388.974.100	Pekanbaru
			2	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat			2.750	Orang	510.892.000	3.025	Orang	550.353.000	4.357	Orang	700.000.000	4.000	Orang	248.746.000	4.000	Orang	150.000.000	18.132	Orang	2.159.991.000	Kabupaten Kota
			3	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengusulkan usulan gelar												50	Orang	72.394.102	50	Orang	72.000.000	100	Orang	144.394.102	Pekanbaru
			4	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas Administrasi Kepegawaian yang dikelola			130	Berkas	114.629.000	130	Berkas	115.202.145	300	Berkas	350.000.000	300	Berkas	159.924.500	300	Berkas	120.000.000	1.160	Berkas	859.755.645	Pekanbaru
			5	Pengelolaan administrasi izin belajar	Jumlah administrasi izin belajar yang diselesaikan			29	Berkas	52.743.000	29	Berkas	45.695.350	29	Berkas	75.000.000							87	Berkas	173.438.350	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target													KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		Lokasi					
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Anggaran							
					Tahun 2014		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran									
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			6	Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	Jumlah Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang terkelola		500	KPE	193.844.200	500	KPE	110.000.000	165	KPE	150.000.000		160	KPE	120.000.000	1.325	KPE	573.844.200	Pekanbaru		
			7	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah data elektronik Pegawai Negeri Sipil ditatakelola					490	Dokumen	119.273.400	8.100	Dokumen	300.000.000		490	Dokumen	100.000.000	9.080	Dokumen	519.273.400	Pekanbaru		
			8	Pengelolaan pensiun PNS	Jumlah SK pensiun PNS yang terselesaikan		318	SK	168.741.000						500	SK	136.415.900				818	SK	305.156.900	Pekanbaru dan Luar Daerah	
			9	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Verifikasi usulan kenaikan pangkat									4.000	Berkas	375.016.000	4.000	Berkas	150.000.000	8.000	Berkas	525.016.000	Pekanbaru		
			10	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau yang diambil sumpah dan pelantikan					1.095	Orang	71.619.000	2.000	Orang	78.781.000	500	Orang	19.569.900	500	Orang	20.590.463	4.095	Orang	190.560.363	Pekanbaru
			11	Halal Bihalal dan Pelepasan Jemaah Haji	Jumlah PNS yang mengikuti halal bihalal dan haji												200	Orang	50.000.000	200	Orang	50.000.000	Pekanbaru		
			12	Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang tersusun dan terkelola		1	Dokumen	165.000.000	1	Dokumen	96.781.500	150	Dokumen	62.000.000	150	Dokumen	103.214.000	150	Dokumen	110.000.000	452	Dokumen	536.995.500	Pekanbaru
			13	Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan perencanaan BKD Provinsi Riau									1	Aplikasi	85.000.000	1	Aplikasi	90.000.000	2	Aplikasi	175.000.000	Pekanbaru		
			14	Pelaksanaan sumpah / janji PNS	Jumlah PNS yang disumpah janjinya												200	Orang	88.082.321	200	Orang	88.082.321	Pekanbaru		
			15	Pengelolaan Website Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah Informasi Berita Web Site Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun						73	Berita	103.214.450	100	Berita	51.643.898	100	Berita	51.643.898	273	Berita	206.502.246	Pekanbaru		
			16	Pengelolaan Humas BKD	Rentang waktu pengelolaan humas BKD					1	Tahun	90.450.000	1	Tahun	125.000.000	1	Tahun	114.965.000	1	Tahun	83.823.319	4	Tahun	414.238.319	Pekanbaru
			17	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Jumlah penataan pindah tugas PNS yang terkelola		1.100	Orang	150.000.000	1.100	Orang	176.573.000	2.400	Orang	300.000.000	3.000	Orang	214.926.100	3.000	Orang	150.000.000	10.600	Orang	991.499.100	Pekanbaru
			18	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau yang ditempatkan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya					1.095	Orang	320.000.000	2.000	Orang	350.000.000	2.000	Orang	209.331.000	2.000	Orang	150.000.000	7.095	Orang	1.029.331.000	Pekanbaru
			19	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang disusun untuk diusulkan		168	Formasi PNS	359.040.000	168	Formasi PNS	259.433.282	250	Formasi PNS	393.654.550	250	Formasi PNS	226.836.600	500	Formasi PNS	130.000.000	1.336	Formasi PNS	1.368.964.432	Pekanbaru
			20	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemda Provinsi Riau	Jumlah Surat Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemda Provinsi Riau yang terkelola		2.500	SK	464.448.000	3.390	SK	487.670.000	2.000	SK	400.000.000	2.000	SK	107.622.900	2.000	SK	150.000.000	11.890	SK	1.609.740.900	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	DATA CAPAIAN KONDISI AWAL												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA				Lokasi				
					Target												Target		Anggaran						
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Anggaran							
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			21	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau	Jumlah Surat Keputusan Administrasi dan Penataan Jabatan Struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau yang terkelola		900	SK	306.000.000								900	SK	306.000.000	Pekanbaru					
			22	Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah Surat Keputusan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau yang terkelola		696	SK	285.000.000								696	SK	285.000.000	Pekanbaru					
			23	Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah Surat Keputusan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau					684	SK	400.000.000						684	SK	400.000.000	Pekanbaru				
			24	Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibawah binaan BKD Provinsi Riau	Jumlah Surat Keputusan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibawah binaan BKD Provinsi Riau yang terkelola		50	SK	143.489.000	20	SK	193.710.000						70	SK	337.199.000	Pekanbaru				
			25	Pengelolaan pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah pengangkatan CPNS menjadi PNS yang dikelola					168	Orang	200.000.000						168	Orang	200.000.000	Pekanbaru				
			26	Pengelolaan Website Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah Informasi Berita Web Site Badan Kepegawaian Daerah					75	Berita	102.700.950						75	Berita	102.700.950	Pekanbaru				
			27	Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKP2D Provinsi Riau	Jumlah Aplikasi Penatausahaan BKP2D Provinsi Riau					1	Aplikasi	75.000.000						1	Aplikasi	75.000.000	Pekanbaru				
			28	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II	Hasil monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II		1	Dokumen	197.932.000									1	Dokumen	197.932.000	Pekanbaru				
			29	Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Hasil Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		1	Dokumen	538.508.000									1	Dokumen	538.508.000	Pekanbaru				
			30	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana Karya Satya		294	Orang	425.350.000									294	Orang	425.350.000	Pekanbaru				
			<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur</b>		<b>Presentase ASN yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui fasilitas asles dn tapetarium dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti</b>	75	Persen	80	Persen	1.923.175.500	85	Persen	1.729.490.504	2	Persen	471.910.000	2	Persen	187.390.000	2	Persen	159.280.000			
			1	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun		80	Orang	110.250.500	80	Orang	121.275.550	80	Orang	121.912.600	80	Orang	75.922.700	60	Orang	50.000.000	380	Orang	479.361.350	Pekanbaru
			2	Penyelenggaraan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah berkas SKP Aparatur Sipil Negara yang diverifikasi					8.057	Berkas	472.148.600				16.497	Berkas	111.467.300				24.554	Berkas	583.615.900	Pekanbaru
			3	Pengelolaan pensiun PNS	Jumlah SK pensiun PNS yang terselesaikan					455	SK	265.581.354	500	SK	349.997.400				500	SK	109.280.000	1.455	SK	724.858.754	Pekanbaru dan Luar Daerah
			4	Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti	Jumlah PNS yang memasuki purna bakti mengikuti orientasi PNS Purna Bakti		300	Orang	791.350.000	300	Orang	870.485.000										600	Orang	1.661.835.000	Luar Daerah
			5	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi kerja baik	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Penghargaan Berprestasi		36	Orang	870.325.000													36	Orang	870.325.000	Luar Daerah
			6	Monitoring dan Evaluasi Tapetarium dan taspen PNS se Provinsi Riau	Hasil monitoring PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN		1	Dokumen	151.250.000													1	Dokumen	151.250.000	Kabupaten Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	DATA CAPAIAN KONDISI AWAL												Target				KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		Lokasi		
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Anggaran	Target	Anggaran					
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran									
					7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
			Program Fasilitas Pindah/Tugas PNS	Terlaksananya fasilitas pindah/purna tugas PNS (kegiatan)	4	Kegiatan													4	Kegiatan	1.270.518.275				
			1 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Jumlah penataan pindah tugas PNS yang dikelola	1.100	Orang													1.100	Orang	94.691.700	Pekanbaru			
			2 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	75	Orang													75	Orang	125.750.100	Pekanbaru			
			3 Pengelolaan pensiun PNS	Jumlah SK pensiun PNS yang terselesaikan	318	Orang													318	Orang	185.201.175	Pekanbaru dan Luar Daerah			
			4 Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti	Jumlah PNS yang memasuki purna bakti mengikuti orientasi PNS Purna Bakti	250	Orang													250	Orang	864.875.300	Luar Daerah			
			Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama KOPRI	Jumlah ASN yang Diberikan Bimbingan Usaha dan Kerjasama Lembaga								50	Orang	700.000.000					50	Orang	700.000.000				
												4	Lembaga						4	Lembaga					
			1 KOPRI Peduli Pada Anggota KOPRI dan Masyarakat	Jumlah Anggota Kopri dan Masyarakat yang mendapat bantuan sosial								100	Orang	300.000.000					100	Orang	300.000.000	Pekanbaru			
			2 Pemantapan Usaha Bagi Anggota KOPRI	Jumlah Anggota KOPRI yang dilakukan pemantapan dalam usaha								50	Orang	400.000.000					50	Orang	400.000.000	Pekanbaru			
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal SKPD	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Baik	48	Persen	48	Persen	8.677.000.300	48	Persen	5.603.271.232	90	Persen	1.154.200.000	100	Persen	4.214.250.000	100	Persen	4.214.250.000	100	Persen	32.527.151.982		
			1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	3.700	Surat	3.700	Surat	47.877.500	3.700	Surat	48.356.275	3.000	Surat	15.246.000	3.000	Surat	23.514.380	3.000	Surat	23.517.000	20.100	Surat	202.036.155	Pekanbaru
			2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	1	Tahun	1	Tahun	1.009.250.000	1	Tahun	902.249.500	1	Tahun	23.958.000	1	Tahun	976.245.000	1	Tahun	900.000.000	6	Tahun	4.729.202.500	Pekanbaru
			3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19	Unit	19	Unit	412.037.000	19	Unit	424.413.400	19	Unit	50.000.000	19	Unit	189.402.800	19	Unit	190.691.514	114	Unit	1.641.123.814	Pekanbaru
			4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	22	Orang	30	Orang	1.037.160.000	30	Orang	1.175.448.000	1	Tahun	150.923.000	1	Tahun	692.574.000	1	Tahun	600.000.000	85	Tahun	4.598.977.900	Pekanbaru
			5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	43	Unit															43	Unit	169.111.000		
			6 Penyediaan alat tulis kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	1	Tahun	1	Tahun	474.819.300	1	Tahun	213.631.725	1	Tahun	80.000.000	1	Tahun	84.092.600	1	Tahun	100.500.000	6	Tahun	1.348.726.425	Pekanbaru
			7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	Tahun	1	Tahun	322.207.600	1	Tahun	196.000.000	1	Tahun	100.000.000	1	Tahun	100.500.000	1	Tahun	100.500.000	6	Tahun	1.112.123.600	Pekanbaru
			8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik	859	Unit	959	Unit	82.500.000	959	Unit	133.384.300	1	unit	11.500.000	1	Unit	74.985.220	1	Unit	92.960.992	2.780	Tahun	470.330.512	Pekanbaru
			9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	146	Unit	301	Unit	2.877.321.700				85	unit	100.000.000	18	Unit	481.050.000	18	Unit	200.000.000	568	Unit	6.274.118.700	Pekanbaru
			10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	Tahun	1	Tahun	208.120.000	1	Tahun	159.951.200	1	Tahun	24.437.000	1	Tahun	69.000.000	1	Tahun	60.000.000	6	Tahun	710.708.200	Pekanbaru
			11 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12.428	Orang	11.956	Orang	210.760.000	13.152	Orang	234.150.000	9.400	Orang	50.000.000	9.400	Orang	99.600.000	9.400	Orang	150.000.000	65.736	Orang	936.110.000	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target														KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA		Lokasi									
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Anggaran										
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran														
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
			12	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan untuk pelaksanaan pengamanan kantor	14	Orang	16	Orang	732.344.200	16	Orang	915.430.250	20	Orang	148.136.000	20	Orang	648.820.000	20	Orang	600.000.000	106	Orang	3.655.017.350	Pekanbaru				
			13	Pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau expo)	Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau Expo)	1	Kegiatan	1	Kegiatan	223.264.800	1	Kegiatan	151.500.000	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	75.000.000	1	Kegiatan	75.000.000	6	Kegiatan	777.732.800	Pekanbaru				
			14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah/Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	122	Kali	122	Kali	844.338.200	122	Kali	852.781.582	122	Kali	250.000.000	122	Kali	699.466.000	122	Kali	715.420.494	732	Kali	4.129.586.526	Luar Daerah dan Kabupaten Kota				
			15	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah Dokumen hasil rapat koordinasi BKD se provinsi riau dan data sinkronisasi program manajemen kepegawaian dengan BKD 12 Kabupaten Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	195.000.000	1	Dokumen	195.975.000	1	Dokumen	100.000.000							4	Dokumen	777.560.500	Pekanbaru				
			16	Pengelolaan Humas BKD	Rentang waktu pengelolaan humas BKD	1	Tahun																1	Tahun	464.950.000	Pekanbaru				
			17	Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani	Rentang waktu pelaksanaan peningkatan jasmani dan rohani	1	Tahun																1	Tahun	124.076.000	Pekanbaru				
			18	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai	Rentan waktu Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai																	1	Tahun	150.000.000	Pekanbaru					
			19	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rentan pengelolaan sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan BKD																	1	Tahun	171.660.000	Pekanbaru					
			20	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rentan waktu penyediaan jasa administrasi keuangan																	1	Tahun	84.000.000	Pekanbaru					
		Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Sesuai dengan Standar Kerja	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Sesuai dengan Standar Kerja	20	Persen	20	Persen	128.832.111.700	20	Persen	10.271.815.464	88	Persen	356.200.000	100	Persen	545.450.000	100	Persen	463.640.000	100	Persen	10.910.150.164						
			1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	10	Unit	15	Unit	57.296.400	15	Unit	122.728.500	86	Unit	80.000.000	86	Unit	70.000.000	86	Unit	70.000.000	298	Unit	440.950.900	Pekanbaru				
			2	Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah unit Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang dilakukan			1	Unit	3.500.000.000											2	Unit	202.580.000	3	Unit	3.702.580.000	Pekanbaru			
			3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor			106	Unit	202.933.200	2093	Unit	355.150.000	591	Unit	120.000.000	125	Unit	217.000.000	125	Unit	100.000.000	3.040	Unit	995.083.200	Pekanbaru				
			4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	2	Unit	2	Unit	1.431.212.200	2	Unit	2.641.936.964	3	Unit	156.200.000	1	Unit	258.450.000	1	Unit	91.060.000	11	Unit	5.771.536.064	Pekanbaru				
			5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	76	Unit	107	Unit	1.379.669.900																183	Unit	2.440.954.500		
			6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor						163	Unit	2.152.000.000														163	Unit	2.152.000.000	
			7	Pengadaan Mebeluer	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	489	Unit	1.033	Unit	1.705.000.000																	1.522	Unit	3.255.000.000	
			8	Pembangunan kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya	Terbangunnya kantor UPT Balai Diklat dan Sarananya	1	Unit	1	Unit	2.556.000.000																2	Unit	6.804.882.000		

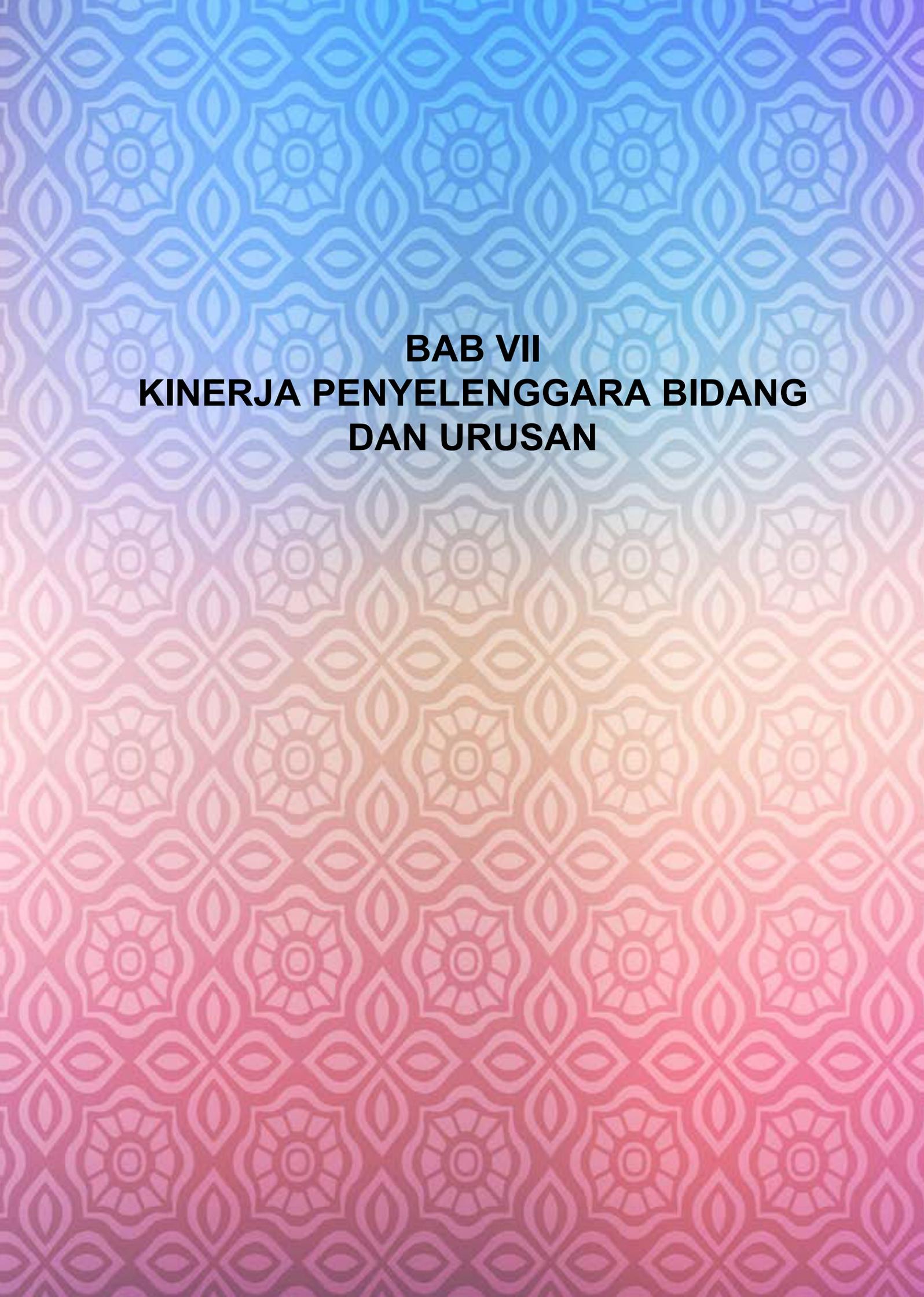
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target													KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA			Lokasi						
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target			Anggaran					
							Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target	Anggaran							
							Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target	Anggaran							
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
			9	Rehabilitasi prasarana dan sarana kantor BKD Ji Cut Nyak Dien	Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan prasarana kantor BKD Ji Cut Nyak Dien	1	Unit										1	Unit	1.544.648.650								
			10	Rehabilitasi Prasarana Gedung UPT Balai Diklat Ji Ronggowarsto	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana gedung UPT Balai Diklat Ji Ronggowarsto	1	Unit										1	Unit	3.682.500.750								
			11	Pembangunan Gudang Arsip 2 (dua) lantai BKD Provinsi Riau	Terlaksananya pembangunan gudang 2 (dua) lantai BKD Provinsi Riau	1	Unit										1	Unit	795.647.000								
			12	Rehabilitasi Gedung I (satu) Kantor BKD Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien	Terlaksananya rehabilitasi Gedung I (satu) Kantor BKD Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien	1	Unit										1	Unit	1.686.843.000								
			13	Pembangunan kantor UPT Assessment dan Sarananya	Terbangunnya kantro UPT Assessment dan Sarananya			1	Unit	5.000.000.000							1	Unit	5.000.000.000								
			14	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optic Antar SKPD	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optic Antar SKPD	1	Unit										1	Unit	17.101.243.948								
			15	Pembangunan Balai Diklat BKD Provinsi Riau Lokasi Pasir Putih	Terbangunnya balai diklat yang berada dipasir putih	1	Unit	1	Unit	118.000.000.000							2	Unit	236.341.798.000								
		Meningkatnya kualitas dan disiplin sumber daya aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin sumber daya aparatur		15	Persen	15	Persen	1.693.230.000	15	Persen	1.570.023.269	96	Persen	155.530.000	100	Persen	505.960.000	100	Persen	430.060.000	100	Persen	5.559.538.269		
			1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pakaian dinas dan perlengkapannya	370	Orang											370	Orang	187.602.500	Pekanbaru						
			2	Pelaksanaan sumpah / janji PNS	Jumlah PNS yang disumpah janjinya	200	Orang	155	Orang	67.250.000	200	Orang	88.082.321	200	Orang	15.000.000	200	Orang	26.616.200		955	Orang	275.018.521	Pekanbaru			
			3	Penanganan kasus-kasus kepegawaian	Jumlah penanganan kasus-kasus kepegawaian yang terselesaikan			10	Orang	220.830.500	20	Orang	145.029.339	80	Persen	22.000.000	80	Persen	105.466.400		190	Persen	493.326.239	Pekanbaru dan Kabupaten			
			4	Pemantauan disiplin PNS	Hasil pemantauan disiplin PNS	1	Dokumen	1	Dokumen	418.608.000	1	Dokumen	420.701.040	20	Persen	22.000.000	20	Persen	73.291.700		43	Persen	1.296.515.740	Pekanbaru dan Kabupaten			
			5	Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti konseling psikologi			150	Orang	375.000.000	150	Orang	287.043.075	150	Orang	22.000.000	150	Orang	66.167.100	150	Orang	285.615.000	750	Orang	1.035.825.175	Pekanbaru	
			6	Pengelolaan (LHKPAN) pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah berkas pengisian Laporan Harta Kekayaan ASN yang dikelola						7.912	Orang	141.970.000	1.124	Berkas	24.530.000								9.036	Berkas	166.500.000	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA			Lokasi					
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Anggaran	Target						
					Tahun 2014		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran									
					Target	Anggaran											Target	Anggaran	Target		Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			7	Pembinaan fisik dan mental aparatur	Jumlah Pegawai Negeri Sipil BKD yang terbina fisik dan mental aparatur				168	Orang	162.105.294	197	Orang	25.000.000	135	Orang	52.489.700			500	Orang	239.594.994	Pekanbaru		
			8	Konsultasi dan Bantuan Hukum	Jumlah PNS yang diberikan konsultasi dan bantuan hukum									50	Orang	181.928.900			50	Orang	181.928.900	Pekanbaru dan Kabupaten			
			9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pakaian khusus hari-hari tertentu	370	Orang	160.443.500	168	Orang	132.132.200	210	Orang	25.000.000				150	Orang	144.445.000	1.100	Orang	668.123.200	Pekanbaru	
			10	Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Training Motivasi Aparatur Sipil Negara				100	Orang	192.960.000										100	Orang	192.960.000	Luar Daerah	
			11	Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Pokja KPK			50	Orang	161.098.000											50	Orang	161.098.000	Pekanbaru	
			12	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010	70	Orang														70	Orang	171.045.000	Pekanbaru	
			13	Sosialisasi Perkalat No.10, 11, 12, dan 13 Tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk.III dan IV pola baru	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Perkalat No.10, 11, 12, dan 13 Tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk.III dan IV pola baru	100	Orang														100	Orang	200.000.000	Pekanbaru	
			14	Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur se- Provinsi Riau	Jumlah Dokumen hasil koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se- Provinsi Riau			1	Dokumen	250.000.000											1	Dokumen	250.000.000	Pekanbaru	
			15	Penyediaan dan pengelolaan atribut PNS Daerah Provinsi Riau	Jumlah atribut PNS Daerah Provinsi Riau yang disediakan dan dikelola			200	Orang	40.000.000											200	Orang	40.000.000	Pekanbaru	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur		7	Persen	6.220.480.000	7	Persen	5.107.516.453	93	Persen	75.000.000	100	Persen	575.920.000	100	Persen	489.530.000	100	Orang	3.662.766.353		
			1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD	Jumlah Pegawai Negeri Sipil bkd yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50	Orang											60	Orang	100.000.000	110	Orang	492.000.000	Luar Daerah	
			2	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan bimtek													26	Orang	257.290.000	26	Orang	257.290.000	Luar Daerah	
			3	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah PNS Kopri yang mengikuti Upacara HUT Kopri													2	Kegiatan	70.000.000	2	Kegiatan	70.000.000	Pekanbaru	
			4	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau			20	Orang	300.000.000	30	Orang	347.424.000	3	Orang	25.000.000	38	Orang	575.920.000			91	Orang	1.248.344.000	Luar Daerah
			5	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat Teknis bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau			20	Orang	300.000.000	30	Orang	239.510.000	3	Orang	25.000.000						53	Orang	564.510.000	Luar Daerah
			6	Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara	Jumlah Widyaiswara yang terfasilitasi mengikuti kompetensi dan pengembangan Widyaiswara			34	Orang	500.000.000	30	Orang	443.382.353	3	Orang	25.000.000						67	Orang	968.382.353	Luar Daerah
			7	Pembinaan fisik dan mental aparatur	Jumlah Pegawai Negeri Sipil BKD yang terbina fisik dan mental aparatur													120	Orang	62.240.000	120	Orang	62.240.000	Pekanbaru	
			8	Diklat TOT Widyaiswara	Jumlah Widyaiswara yang terfasilitasi mengikuti TOT untuk calon Widyaiswara			15	Orang	262.612.000	30	Orang	347.424.000								45	Orang	610.036.000	Luar Daerah	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA			Lokasi		
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Anggaran		Target	
					Tahun 2014	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran						
					7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			9	Diklat Training of Facilitator (TOF)	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti diklat Training of Facilitator (TOF)		30	Orang	244.066.000								30	Orang	244.066.000	Pekanbaru	
			10	Diklat Training Officer Course (TOC)	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Training Officer Course (TOC)		30	Orang	280.610.000	30	Orang	282.013.050						60	Orang	562.623.050	Pekanbaru
			11	Diklat Management of Training (MOT)	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Management of Training (MOT)		30	Orang	280.610.000	30	Orang	282.013.050						60	Orang	562.623.050	Pekanbaru
			12	Diklat Luar Negeri ( Kerjasama dengan Pemerintah Singapore ) I	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Luar Negeri (kerjasama dengan pemerintah Singapore ) I		20	Orang	393.312.000									20	Orang	393.312.000	Luar Daerah
			13	Diklat Analisis kebutuhan diklat	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat analisis kebutuhan diklat		60	Orang	174.316.500	60	Orang	301.500.000						120	Orang	475.816.500	Pekanbaru
			14	Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja		40	Orang	192.605.000	60	Orang	301.500.000						100	Orang	494.105.000	Pekanbaru
			15	Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah		60	Orang	150.000.000	60	Orang	301.500.000						120	Orang	451.500.000	Pekanbaru
			16	Diklat Teknis Administrasi Kearsipan	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Teknis Administrasi Kearsipan		60	Orang	138.000.000	60	Orang	301.500.000						120	Orang	439.500.000	Pekanbaru
			17	Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Penyusunan Tata Naskah Dinas		30	Orang	74.068.500	30	Orang	100.500.000						60	Orang	174.568.500	Pekanbaru
			18	Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian		30	Orang	76.331.000	30	Orang	100.500.000						60	Orang	176.831.000	Pekanbaru
			19	Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur		30	Orang	58.228.500	30	Orang	100.500.000						60	Orang	158.728.500	Pekanbaru
			20	Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi		30	Orang	134.935.000	30	Orang	100.500.000						60	Orang	235.435.000	Pekanbaru
			21	Diklat penata usahaan keuangan daerah	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat penata usahaan keuangan daerah		30	Orang	98.500.000	30	Orang	100.500.000						60	Orang	199.000.000	Pekanbaru
			22	Diklat bendahara keuangan daerah	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat bendahara keuangan daerah		30	Orang	135.000.000	30	Orang	100.500.000						60	Orang	235.500.000	Pekanbaru
			23	Diklat pengelolaan aset daerah	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat pengelolaan aset daerah		60	Orang	174.390.000	60	Orang	301.500.000						120	Orang	475.890.000	Pekanbaru
			24	Diklat Teknis Pelayanan Publik yang Prima dan Berwawasan Good Governance	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Teknis Pelayanan Publik yang Prima dan Berwawasan Good Governance		60	Orang	250.000.000	60	Orang	301.500.000						120	Orang	551.500.000	Pekanbaru
			25	Diklat pengembangan e-government	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat pengembangan e-government		30	Orang	200.000.000	30	Orang	150.750.000						60	Orang	350.750.000	Pekanbaru
			26	Diklat perencanaan tingkat dasar	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat perencanaan tingkat dasar		30	Orang	250.000.000	30	Orang	150.750.000						60	Orang	400.750.000	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target													KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA			Lokasi			
					DATA CAPAIAN KONDISI AWAL			Tahun 2015			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target	Anggaran		Target		
					Tahun 2014	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019										
					Target	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran									
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			27	Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		30	Orang	200.000.000	30	Orang	150.750.000								60	Orang	350.750.000	Pekanbaru	
			28	Diklat Teknis Bahasa Inggris (Toefl)	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Teknis Bahasa Inggris (Toefl)		60	Orang	91.751.000	20	Orang	201.000.000								80	Orang	292.751.000	Pekanbaru	
			29	Pelatihan dan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti pelatihan dan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau		15	Orang	1.187.076.500											15	Orang	1.187.076.500	Pekanbaru dan Luar Daerah	
			30	Diklat Pengembangan Potensi Akademik	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Pengembangan Potensi Akademik		30	Orang	74.068.000	30	Orang	100.500.000								60	Orang	174.568.000	Pekanbaru	
		Nilai akuntabilitas, persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan		11	Persen	733.793.200	10	Persen	543.981.800	94	Persen	267.000.000	100	Persen	-	100	Persen	-	100	Persen	2.189.303.025	
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen	96.800.000	1	Dokumen	65.109.398	1	Dokumen	25.000.000							4	Dokumen	282.109.398	Pekanbaru
			2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan keuangan semesteran	1	Dokumen	55.000.000	1	Dokumen	55.550.000	1	Dokumen	25.000.000							4	Dokumen	185.550.000	Pekanbaru
			3	Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis realisasi Anggaran	1	Dokumen	55.000.000	1	Dokumen	55.550.000	1	Dokumen	25.000.000							4	Dokumen	185.550.000	Pekanbaru
			4	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	55.000.000	1	Dokumen	55.550.000	1	Dokumen	17.000.000							4	Dokumen	177.550.000	Pekanbaru
			5	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	1	Dokumen													1	Dokumen	290.222.750	Pekanbaru	
			6	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rencana Kerja (Renja) SKPD	1	Dokumen	148.459.200	1	Dokumen	149.943.792	5	Dokumen	100.000.000							8	Dokumen	574.502.992	Pekanbaru
			7	Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Dokumen Laporan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	3	Dokumen	103.237.600	3	Dokumen	55.000.000	3	Dokumen	30.203.400							12	Dokumen	272.601.000	Pekanbaru
			8	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah Laporan Tahunan	1	Laporan													1	Laporan	25.325.000	Pekanbaru	
			9	Pelaporan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan barang milik daerah	1	Dokumen	51.761.000	1	Dokumen	52.278.610	1	Dokumen	44.796.600							4	Dokumen	195.891.885	Pekanbaru
			10	Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Jumlah Dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD					1	Dokumen	55.000.000									1	Dokumen	55.000.000	Pekanbaru





**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARA BIDANG**  
**DAN URUSAN**

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARA BIDANG DAN URUSAN

Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018 merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menggunakan Indikator kinerja sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2018 pada misi yang ke 5 (lima) yaitu “**Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik**”.

#### Tujuan dan Sasaran Misi ke 5 RPJMD

<b>Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik</b>								
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya <i>good governance and clean government</i>	Nilai Reformasi Birokrasi	na	37.66	37.69	38.63	39.60	40.59

Sumber : RPJMD Provinsi Riau

**Tabel 7.1.**

**Indikator Kinerja BKD Provinsi Riau yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya	-	-	-	-	2%	2%	2%
2	Peningkatan Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-	10%	10%	10%
3	Persentase menurunnya pelanggaran disiplin	-	-	-	-	40%	35%	30%
4	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	B	B	B



**BAB VIII**  
**PENUTUP**

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Handal (terpercaya)”**. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah

Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau selama periode 2014-2019.

Demikian penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019, agar dapat dijadikan sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggung jawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.



Jalan Cut Nyak Dien No. 1  
Telp. (0761) 21172, Fax (0761) 21172  
Kode Pos : 28126, Pekanbaru Riau